

SKRIPSI

**PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN TINGKAT
PENDIDIKAN MASYARAKAT TERHADAP KEMISKINAN
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2021**



Disusun Oleh:

**CITRA PUJANITA ADINDA
NIM. 190602127**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M / 1445H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Pujianita Adinda
NIM : 190602127
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya dan diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023



Yang Menyatakan,


Citra Pujianita Adinda

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Pendidikan
Masyarakat Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif
Ekonomi Syariah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun
2017-2021**

Disusun Oleh:

Citra Pujianita Adinda

NIM: 190602127

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Khairul Amri, S.E., M.Si

NIDN. 0106077507



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

NIDN. 2026028803

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag

NIP.197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Citra Pujianita Adinda

NIM: 190602127

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

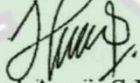
Rabu, 14 Juni 2023M

25 Dzulqa'dah 1444H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

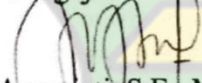
Ketua,
Pembimbing I,



Khairul Amri, S.E., M.Si

NIDN. 0106077507

Penguji I



Ayumliati, S.E., M.Si

NIP: 197806152009122002

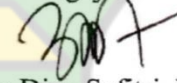
Sekretaris,
Pembimbing II,



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

NIDN. 2026028803

Penguji II



Winny Dian Safitri, M.Si

NIP: 199005242022032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furgani, M.Ec

NIP: 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Citra Pujianita Adinda

NIM : 190602127

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 190602127@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada), Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, Mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Juli 2023

Mengetahui:

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

(Citra) (Khairul Amri, S.E., M.Si) (Azimah Dianah, S.E., M.Si.,Ak)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Rasulullah bersabda:

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

“Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsu dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah mati”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayahanda dan ibunda yang telah sangat berjasa dalam hidup saya yang tidak mungkin terbalaskan serta adik-adik yang telah memberikan dukungan dan doa terbaiknya. Serta dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik. Tidak lupa untuk para guru dan sahabat yang selalu ada saat saya membutuhkan bantuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah, dimana atas berkah rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Atas izin Allah serta bantuan dari berbagai pihak penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2021”**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fithriady, Lc., MA., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilamsari, Lc., M.Ag selaku ketua program studi Ekonomi Syariah dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiizh Maulana, SP., Shi., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Khairul Amri, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membantu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayumiati, S.E., M.Si dan Winny Dian Safitri, M.Si, selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan sarannya terhadap skripsi saya sehingga penulisan skripsi ini jauh lebih baik.
6. Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak. Selaku Penasehat Akademik, dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen-dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
7. Teristimewa kepada Orang Tua yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Muhammad Daud dan Ibunda Nazira, yang selalu mendoakan saya tiada hentinya untuk keselamatan dan kebahagiaan saya dan terima kasih kepada

adik-adik saya yang senantiasa mendukung dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada guru-guru saya Ustadz Fajar, Ustadzah Mukhlisah, Ustadzah Siti dan para guru yang selalu mendoakan kebaikan bagi para muridnya.
9. Untuk adik-adik saya Nadia Maulina dan Maulidia Virgiar Danar yang telah memberikan dukungan dan menyemangati dalam penulisan skripsi.
10. Teruntuk Angga Raditcha Luckyansah. AR, terima kasih telah mendukung dan selalu menyemangati selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman penulis Annisa Rahmah, Indah Raiyan, dan Nisa Ul Muftia yang telah menemani, mendukung, dan menyemangati dari awal perkuliahan hingga sekarang.
12. Teruntuk teman-teman Baitul Ithqan seperjuangan yang telah menemani dan memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
13. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2019 yang sangat sering membantu dalam banyak hal. Dan untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberi arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlimpah.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

Penulis

Citra Pujianita Adinda



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كَيْفَ

haulā : هَوْلًا

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	A
إ	<i>Kasrah</i> dan ya	I
و	<i>Dammah</i> dan wau	U

Contoh:

Qala : قَالَ

rama : رَمَى

qila : قِيلَ

yaqulu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Raudah al-atfal/ raudatulafal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madinah al-Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Citra Pujianita Adinda
NIM : 190602127
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2021
Pembimbing I : Khairul Amri, S.E., M.Si
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tak lepas dari problematika kemiskinan yang melanda. Pengalokasian dana otonomi khusus dan pemerataan pendidikan masyarakat diharapkan menjadi beberapa solusi terhadap permasalahan kemiskinan khususnya di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kemiskinan menurut perspektif ekonomi syariah di Provinsi Aceh. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Variabel dana otonomi khusus berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Aceh sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: *Dana Otonomi Khusus, Tingkat Pendidikan, Kemiskinan*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI...	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN...	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Kemiskinan	17

2.1.1 Pengertian Kemiskinan.....	17
2.1.2 Teori Kemiskinan.....	18
2.1.3 Indikator Kemiskinan.....	20
2.1.4 Macam-Macam Kemiskinan.....	21
2.1.5 Penyebab Kemiskinan.....	21
2.1.6 Dampak Kemiskinan.....	23
2.1.7 Kemiskinan dalam Perspektif Islam.....	24
2.2 Dana Otonomi Khusus.....	34
2.2.1 Pengertian Dana Otonomi Khusus.....	34
2.2.2 Indikator Dana Otonomi Khusus.....	36
2.2.3 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus...	37
2.3 Tingkat Pendidikan.....	40
2.3.1 Pengertian Tingkat Pendidikan.....	40
2.3.2 Indikator Tingkat Pendidikan.....	42
2.3.3 Tingkat Pendidikan dalam Perspektif Islam.....	43
2.4 Penelitian Terkait.....	45
2.5 Keterkaitan Antar Variabel.....	53
2.5.1 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan.....	53
2.5.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	54
2.6 Kerangka Berpikir.....	55
2.7 Hipotesis Penelitian.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Desain Penelitian.....	58

3.2 Sumber dan Teknik Perolehan Data.....	58
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	59
3.3.1 Kemiskinan sebagai Y.....	59
3.3.2 Dana Otonomi Khusus sebagai X_1	60
3.3.3 Tingkat Pendidikan sebagai X_2	60
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data.....	62
3.4.1 Model Regresi Data Panel.....	62
3.4.2 Model Estimasi Data Panel.....	64
3.4.3 Uji Spesifikasi Model.....	65
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	67
3.5.1 Uji Normalitas.....	67
3.5.2 Uji Multikolinieritas.....	67
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	68
3.6 Uji Hipotesis.....	69
3.6.1 Uji T-statistik.....	69
3.6.2 Uji F-statistik.....	70
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Deskripsi Wilayah Provinsi Aceh.....	72
4.2 Analisa Deskriptif.....	73
4.3 Hasil Penelitian.....	78
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	78
4.3.2 Koefisien Korelasi.....	80
4.3.3 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	81
4.3.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	84

4.3.5 Model Regresi Data Panel Terpilih.....	87
4.4 Uji Asumsi Klasik	89
4.4.1 Uji Normalitas.....	89
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	90
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	91
4.5 Pengujian Hipotesis	92
4.5.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T).....	93
4.5.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	94
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	95
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
4.6.1 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah...	95
4.6.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.....	97
4.6.3 Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.....	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR TABEL

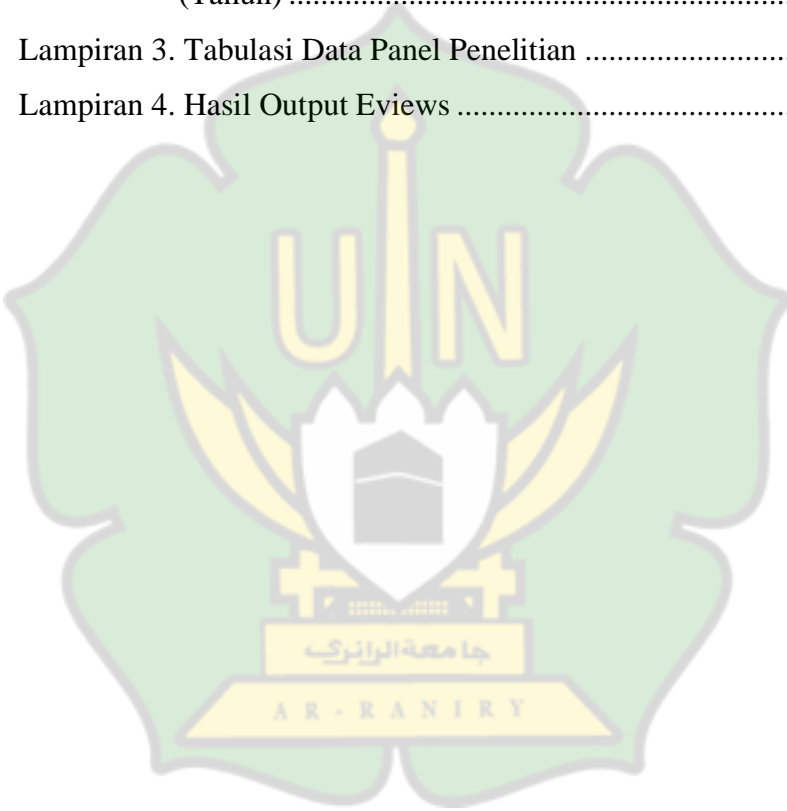
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	48
Tabel 3.1 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian.....	61
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	79
Tabel 4.2 Hasil Koefisien Korelasi.....	80
Tabel 4.3 Common Effect Model.....	82
Tabel 4.4 Fixed Effect Model.....	83
Tabel 4.5 Random Effect Model.....	84
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow Test.....	85
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman Test.....	86
Tabel 4.8 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	87
Tabel 4.9 Hasil Random Effect Model Sebagai Model Regresi Terpilih.....	88
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	91
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	92
Tabel 4.12 Uji Hipotesis Berdasarkan Model Regresi Terpilih.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2021...	5
Gambar 1.2 Persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Tahun 2021-2022.....	6
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2017-2022	7
Gambar 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Tahun 2017-2022	8
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian Kuantitatif	56
Gambar 4.1 Peta Provinsi Aceh.....	72
Gambar 4.2 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021.....	74
Gambar 4.3 Rata-Rata Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2008-2021.....	76
Gambar 4.4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Tahun 2017-2021.....	78
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh (Ribu Jiwa)	110
Lampiran 2. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Aceh (Tahun)	111
Lampiran 3. Tabulasi Data Panel Penelitian	112
Lampiran 4. Hasil Output Eviews	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kondisi kemiskinan suatu negara merupakan suatu permasalahan yang selalu menjadi pembahasan. Kemiskinan juga disebut masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, hingga kondisi lingkungan. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya kemiskinan maka dapat disimpulkan menurun pula kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kemiskinan menjadi masalah klasik yang besar dan mendasar bagi negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Negara Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kemiskinan dapat dijadikan sebagai ukuran baik buruknya perekonomian suatu negara (Munandar dkk., 2020).

Dalam kaca mata Islam, kemiskinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan di dunia ini yang telah ditetapkan oleh Allâh *Azza wa Jalla* sebagai bentuk keadilan. Allah telah memberikan rezeki kepada hamba-hamba Nya dengan ketentuan yang adil dan sesuai

dengan keadaan dan kemuliaan para hamba-Nya. Allâh *Ta'ala* berfirman:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah: "*Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya). Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*". (Q.S. Saba:36)

Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini merupakan wujud keadilan Allâh. Jadi, baik kemiskinan dan kekayaan itu merupakan bentuk kasih sayang Allâh kepada makhluk-Nya dalam rangka menciptakan keseimbangan di muka bumi.

Namun demikian, tidak berarti bahwa kemiskinan itu lebih baik dari pada kekayaan, karena dalam kemiskinan itu pun banyak sekali cobaannya yang dapat menghantarkan kepada kekufuran dan musibah sosial. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihiwasallam* selalu memohon perlindungan kepada Allâh *Ta'ala* dari kejahatan yang muncul akibat kemiskinan.

Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah keadaan atau takdir yang harus dinikmati oleh orang yang terkena nasib miskin, namun Islam mengajarkan betapa pentingnya potensi dan kemampuan yang ada di setiap insan untuk dikelola dan dikembangkan untuk menghindari mereka dari keadaan miskin, dengan berbagai cara yang tidak dilarang oleh syariat Islam.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga tak lepas dari problematika kemiskinan yang melanda. Usaha pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah tertentu untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya. Sehubungan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan di daerah diselenggarakan melalui tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Otonomi Khusus yang diberlakukan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah desentralisasi luas namun tidak harus seragam untuk wilayah negara mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Daerah di Indonesia yang diberi kewenangan dengan Otonomi Khusus adalah Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan Yogyakarta.

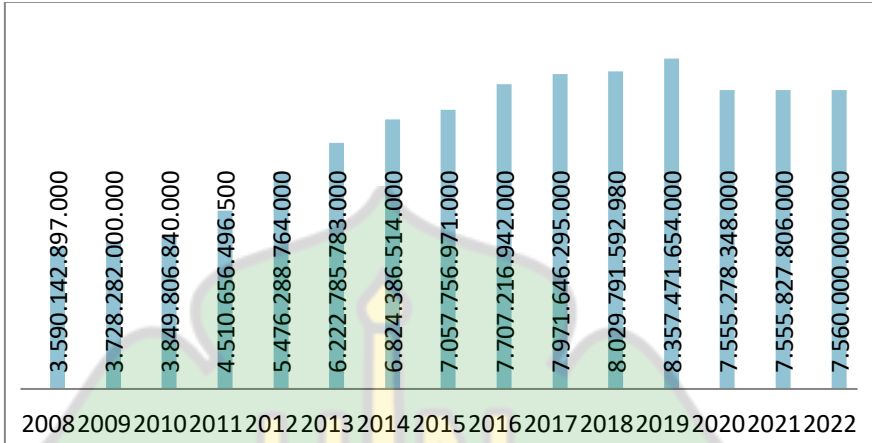
Otonomi Khusus Provinsi Aceh merupakan suatu wewenang yang ditujukan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh untuk mengatur dan mengurus wilayahnya dengan roda pemerintahannya tanpa terlepas dari pengawasan Pemerintah Pusat. Pemberian Otonomi Khusus kepada Provinsi Aceh karena kekhasan karakter masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam, selain itu juga wujud penghargaan negara terhadap dedikasi dan perjuangan yang sangat luar biasa dari Aceh selama perang kemerdekaan. Perlakuan khusus ini menjadi keuntungan bagi Provinsi Aceh untuk

mengembangkan pemerintahannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Otonomi khusus Aceh dipandang dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat apabila didorong oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi khusus di Aceh akan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya karena pemerintah daerah lebih dekat dengan penduduk daerahnya daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah diharapkan memiliki informasi yang akurat dan bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat.

Landasan hukum Otonomi Khusus Aceh adalah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 183 ayat (1) undang-undang itu mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020). Pada penerapan status Otonomi Khusus ini, Aceh berhak menerima Dana Otonomi Khusus selama 20 tahun yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sejak dianggarkan pertama kali di tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 total alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 95,93 triliun rupiah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Gambar 1.1
Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2022



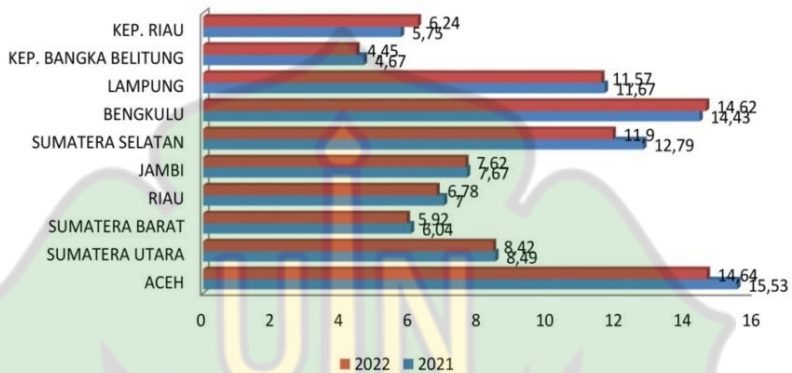
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Data Diolah (2023)

Berdasarkan grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa Dana Otonomi Khusus yang diterima merupakan jumlah yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh. Namun, besarnya Dana Otonomi Khusus tidak lantas membuat Provinsi Aceh jauh lebih makmur dibandingkan daerah lain. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Dengan menyerahkan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan masih mengalami kendala di daerah sehingga perlu dievaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh

kebijakan desentralisasi fiskal berupa dana otonomi khusus mampu mengurangi kemiskinan di daerahnya.

Gambar 1.2

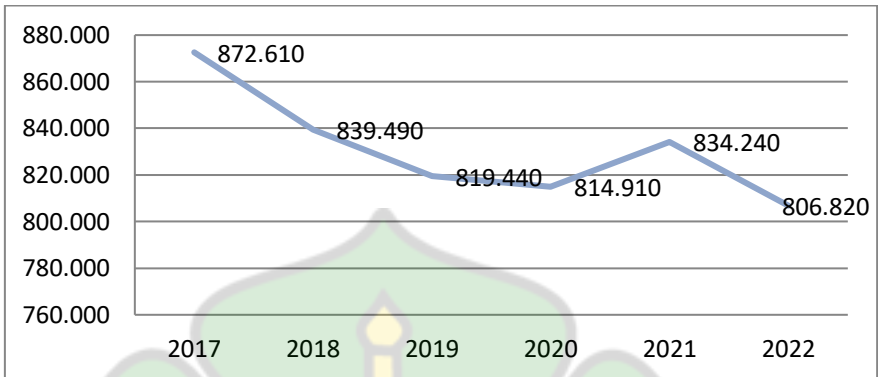
Persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Tahun 2021-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera dan berada pada posisi ke-6 di Indonesia. Sehingga dapat diartikan bahwa suatu daerah yang telah diberi kewenangan melalui otonomi daerah tidak serta merta dapat menyelesaikan problematika di wilayah tersebut, apalagi permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2017-2022



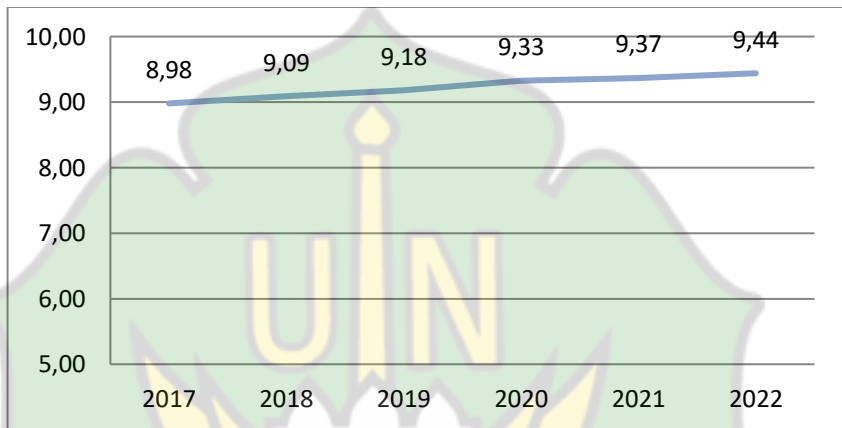
Sumber: Badan Pusat Statistik Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh per Maret 2022 sebanyak 806.82 jiwa. Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 818.47 jiwa dengan persentase sebesar 14,75% per September 2022 (BPS, 2022). Menurut Ali (2019), jumlah Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat Aceh.

Indikator lain yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat. Zartika (2016) mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor rendahnya taraf pendidikan, sehingga mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan sulit bersaing di dunia kerja yang rata-rata mengutamakan tingkat pendidikan. Rendahnya

kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu daerah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja.

Gambar 1.4
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Data Diolah (2022)

Pada tahun 2022 penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas, rata-rata bersekolah sampai dengan kelas satu SMA atau telah mengenyam pendidikan selama 9,44 tahun. Rata-rata lama sekolah Indonesia juga masih di bawah Program Pendidikan Dasar, yaitu 8,69 tahun artinya penduduk Indonesia baru dapat menikmati pendidikan sampai tingkat dua SMP yaitu dua tahun lebih rendah dari rata-rata lama sekolah penduduk Aceh. Padahal pemerintah Indonesia telah menentukan wajib belajar 9 tahun, artinya masyarakat Indonesia minimal harus menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Bahkan terdapat 1,75% penduduk Aceh yang masih buta huruf, artinya masih ada penduduk yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin. Minimnya minat belajar

masyarakat Provinsi Aceh bisa saja disebabkan oleh faktor biaya dan kebutuhan pendidikan yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat.

Pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat besar. Menurut Afzal (2012), pendidikan memiliki pengaruh dan manfaat yang besar terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya investasi dalam bidang pendidikan, selain itu peningkatan dalam kualitas pendidikan dan akses yang mudah dalam memperoleh pendidikan. Menurut Anderson (2012), tingkat pendidikan yang memadai akan memperbesar bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Terdapat hubungan yang kuat antara pendidikan dan kemiskinan, dimana melalui pendidikan dapat mengurangi kemiskinan, sedangkan kemiskinan dapat membatasi akses terhadap pendidikan (Pokharel, 2015). Disisi lain rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga menyebabkan meningkatnya kemiskinan, karena orang yang berpendidikan rendah akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, lingkaran setan ini akan terus berputar, dimana yang miskin akan tetap miskin (Sukidjo, 2019; Persico, 2020; Sartika et al., 2016).

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allâh *Azza wa Jalla*, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan

uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Peningkatan dalam pendidikan memberi beberapa manfaat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan sekaligus dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu komponen penyebab terjadinya kemiskinan. Pembangunan bidang pendidikan adalah aspek penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Melalui investasi bidang pendidikan maka akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan akan mendorong meningkatnya produktivitas seseorang, sehingga akan meningkatkan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Berikut adalah temuan peneliti sebelumnya tentang keterkaitan antara dana otonomi khusus dengan kemiskinan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kadafi & Murtala (2020) menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Febriaty (2021)

menunjukkan bahwa peningkatan dana otonomi khusus berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin. Dalam penelitian ini variabel dana otonomi khusus menjadi faktor yang sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui apakah dana otonomi khusus mempengaruhi kemiskinan atau tidak.

Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya tentang keterkaitan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Aulia, dkk (2019) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina, dkk (2018) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian ini variabel tingkat pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan atau tidak.

Hal yang penting untuk diperhatikan ialah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa memberikan pengaruh serta dampak pada penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan setiap tahunnya. Untuk menurunkan kemiskinan suatu daerah maka perlu dikeluarkannya kebijakan pemerintah daerah Aceh melalui implementasi dana otonomi khusus dan upaya peningkatan tingkat pendidikan. Kebijakan dana otonomi khusus memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dan begitu pula dengan adanya peningkatan pendidikan memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan baik dampak yang negatif maupun dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Namun, pada penelitian ini berbeda dikarenakan lokasi dan waktu penelitian juga menilai pengaruh dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Aceh?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Aceh menurut perspektif ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Aceh.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Aceh.
3. Mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Aceh menurut perspektif ekonomi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi semua pihak secara teoritis, praktis, maupun kebijakan.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan tentang pengaruh dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan.

- b. Bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai produk penelitian di jurusan Ekonomi Syariah dan

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi civitas kepastakaan akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya tingkat pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah terkait dengan dana otonomi khusus, tingkat pendidikan, dan kemiskinan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap pengembangan dan pemahaman mahasiswa serta dapat dijadikan referensi teori dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kebijakan yang baru dan baik serta dapat menyusun berbagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan suatu urutan penyajian untuk mempermudah dalam menyusun proposal penelitian ini, adapun penyusunan proposal penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, sebagaimana penelitian pada umumnya, adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini berisi tentang kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga dalam penelitian ini yaitu tentang metode penelitian yang memuat tentang rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan yaitu mencakup desain penelitian, sumber data penelitian, metode analisis data dan rencana penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini memuat gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil data penelitian dan pembahasan hasil data penelitian serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab lima ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Dewi (2016) menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah satu dari persoalan dasar, sebab kemiskinan melibatkan pemenuhan kepentingan paling dasar pada aktivitas masyarakat serta kemiskinan merupakan urusan universal yang dialami berbagai negara. Menurut Adelfina (2016) kemiskinan adalah masalah yang sangat penting sebab kemiskinan berawal dari ketidakmampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehingga menyebabkan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan diabaikan.

Menurut Ariwuni & Kartika (2019) kemiskinan adalah satu dari bagian masalah yang sulit dilalui oleh para penyusun kebijakan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan yang dimiliki oleh beberapa orang untuk mendapatkan hidup layak, pendidikan yang tinggi dan kesehatan konsumsi makanan yang kurang layak. Rendahnya kualitas pada masyarakat miskin membuat produktivitas rendah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi rendah. Kemiskinan adalah permasalahan pembangunan yang bercirikan pengangguran serta ketinggalan perkembangan, yang kemudian memperburuk menjadi ketimpangan.

Ariwuni & Kartika (2019) menyatakan bahwa produktivitas yang rendah diakibatkan karena ketidakmajuan, tidak sempurnanya pasar serta rendahnya sumber daya yang dimiliki. Kapasitas kecil menimbulkan upah diperoleh lebih sedikit. Selanjutnya upah yang rendah akan berdampak kepada tabungan dan investasi. Badrudin (2017) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat berjangka panjang dan luas, sehingga metode penanggulangan kemiskinan juga perlu dianalisis dengan baik, mencakup semua aspek masalah, sehingga diperlukan strategi penanggulangan yang tepat, berkelanjutan dan non-kontemporer. Kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan memperoleh barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kurangnya barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mencapai taraf hidup (Sudarwati, 2009).

Menurut Imam Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari segi kebutuhan material dan kebutuhan rohani. Argumen tersebut juga dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh.

2.1.2 Teori Kemiskinan

Menurut Sukirno (2006) terdapat beberapa macam teori kemiskinan, yaitu:

1. Teori Neo Liberal

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya apabila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Cara menangani kemiskinan secara langsung melalui keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Peran negara hanya sebagai penjaga yang baru boleh campur tangan apabila lembaga-lembaga tadi sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

2. Teori Sosial Demokrat

Teori ini menganggap bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu tetapi persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber-sumber kemasyarakatan terutama sumber ekonomi. Teori Sosial Demokrat menyarankan peranan pemerintah untuk menanggapi kemiskinan yang ada.

3. Teori Marjinal

Teori ini menganggap bahwa kemiskinan diperkotaan terjadi disebabkan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Konsep Lewis yang terkenal mengatakan "*Culture of Poverty*". Menurut Lewis masyarakat di dunia menjadi

miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter, apatis, kurang usaha, hanya menyerah pada nasib, sistem keuangan yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi untuk membangun masa depan, kesejahteraan dan kekerasan banyak terjadi.

4. Teori Pembangunan

Teori ini muncul dari teori-teori ekonomi pembangunan terutama neo liberal yang menjelaskan kemiskinan terjadi karena persoalan ekonomi yang dianggap tidak adil.

5. Teori Struktural

Teori ini berdasarkan pemikiran yang berasal dari teori ketergantungan yang diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan terjadi bukan karena persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan karena politik ekonomi dunia.

2.1.3 Indikator Kemiskinan

Menurut BPS (2020), data kemiskinan didapatkan melalui survei nasional yang diadakan oleh badan pusat statistik. Saat ini BPS menggunakan metode yang paling banyak digunakan oleh negara lain yaitu menggunakan metode strategi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui strategi ini keperluan dasar konsumsi rumah tangga sebesar 2.100 kilokalori setiap orang dijumlahkan melalui keperluan dasar kelompok tidak konsumsi.

Ketidakcukupan berdasarkan pada penyisihan biaya ataupun penerimaan pada hidup berkecukupan sedikitnya pada rupiah adalah strategi secara moneter (*monetary approach*). Masyarakat miskin merupakan masyarakat yang umumnya mempunyai penyisihan biaya per kapita setiap bulan berada pada bawah garis kemiskinan (GK). Wahab & Alga (2017) menyatakan bahwa dari segi ekonomi, jika biaya hidup sehari-hari kurang dari \$1, tergolong kemiskinan ekstrim.

2.1.4 Macam-Macam Kemiskinan

Menurut BPS (2020) terdapat dua macam kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan relatif adalah standar hidup yang ditetapkan dan ditentukan menurut subjektif bagi penduduk sekitar bersifat lokal, dan masyarakat yang terletak di bawah standar penilaian tergolong relatif miskin.
2. Kemiskinan absolut adalah standar hidup minimum yang dibutuhkan dalam memenuhi keperluan dasar yang esensial, termasuk konsumsi serta bukan konsumsi. Standar hidup minimum yang memenuhi keperluan dasar ini yaitu garis kemiskinan.

2.1.5 Penyebab Kemiskinan

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Aziz, dkk (2016) faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah:

1. Pendidikan

Tingginya pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja dan dengan pendidikan dapat mengubah pola pikir menjadi lebih rasional dan logis. Dengan berpikir secara rasional diharapkan dapat menjadi dasar untuk memandang dan menyelesaikan permasalahan. Namun mahalnya biaya pendidikan tidak dapat dijangkau oleh semua masyarakat, meski pemerintah telah memberlakukan kebijakan pendidikan gratis untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), faktor biaya lain seperti buku pelajaran masih sangat tinggi, seragam sekolah, dan keperluan lainnya.

2. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pada umumnya masyarakat miskin dihadapi dengan masalah terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

3. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

2.1.6 Dampak Kemiskinan

Menurut Margareni (2016) kegagalan dalam mengatasi kemiskinan akan berdampak kepada permasalahan yang serius dan dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi dan politik di lingkungan masyarakat. Menurut Abilawa (2016) kemiskinan akan menyebabkan permasalahan sosial berupa penurunan pada jumlah sumber daya manusia, adanya ketimpangan, meningkatnya kriminalitas, tatanan sosial yang tidak stabil dan adanya rasa kecemburuan sosial pada masyarakat. Kemiskinan memiliki dampak yang serius dari berbagai hal menurut Itang (2017) terdapat dampak dari adanya kemiskinan tersebut :

1) Pengangguran

Pengangguran adalah akibat dari kemiskinan karena sulitnya masyarakat memperoleh pendidikan dan keterampilan, serta sulit bagi masyarakat dalam perkembangan serta memperoleh kerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhannya.

2) Kriminalitas

Kriminalitas adalah efek pada kemiskinan. Sulitnya memperoleh rezeki menyebabkan individu hilang kesadaran akhirnya mendapatkan alternatif lain dengan tidak memperdulikan baik ataupun buruk rezeki selama transaksi dalam memperoleh keinginan.

3) Putusnya sekolah

Putus sekolah serta harapan pengetahuan tidak diragukan lagi adalah akibat dari kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan membuat orang miskin tidak bisa bersekolah karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah.

4) Kesehatan yang rendah

Kemiskinan menyebabkan gizi sehari-hari tidak mencukupi, sehingga penduduk miskin sulit memelihara kesehatan, sehingga sulit memperoleh kesehatan.

2.1.7 Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, penyebab kemiskinan terjadi karena perbedaan pendapatan. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan, oleh karena itu Islam tidak berbicara mengenai upaya menghilangkan kemiskinan, namun berbicara tentang mereduksi dan meminimalisir kemiskinan agar tercapai kehidupan yang sejahtera. Caranya adalah dengan saling tolong menolong, saling

bersilaturahmi dan saling bersinergi (Beik, 2016:70). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحِضُ ﴿٣﴾
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٤﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٧﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan.” (Q.S. Al-Ma'un:1-7)

Menurut Ishomuddin (2005), surah Al-Ma'un ayat 1-7 menjelaskan bahwa orang yang mengaku beragama dan shalat tetapi tidak ingin menolong orang-orang yang lemah dan miskin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implisit pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidakmiskinan ada agar manusia saling tolong menolong.

Allah juga berfirman dalam Surah Al-Muddatsir yakni:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَآمَنَّا بِكَ نُطْعِمُ
الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ لَخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya : “*Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang bathil) bersama orang-orang yang membicarakannya”* (Q.S. Al-Muddatsir:42-45)

Ayat di atas menunjukkan sebab-sebab segolongan manusia dimasukkan ke dalam neraka di akhirat. Salah satu dari sebab-sebab itu adalah karena mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya kesulitan. Hal ini menjelaskan bahwa memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus ditegakkan.

Allah telah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ma’un. Dari sisi *supply*, Allah mengajarkan umat muslim untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah. Dari

sisi *demand*, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan adanya ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf). Mekanisme tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial antara golongan miskin dan kaya (Rohani, 2014:32).

Secara mendalam yang ingin dituju dalam sistem ekonomi Islam adalah Islam yang kaffah dalam aspek ekonomi, yaitu tercapainya *mashlahah* atau *falah* (kesejahteraan) bagi umat manusia. Untuk mencapai hal tersebut perlu menggunakan konsep *maqashid al-syariah* yang merupakan tujuan dari syariat Islam untuk melindungi umat manusia. *Maqashid al-syariah* mempunyai peranan penting untuk merumuskan sesuatu yang *mashlahah* bagi umat manusia tanpa meninggalkan inti dari ajaran Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali di dalam bukunya *Ihya Ulum Ad-Din*, *mashlahah* dalam aturan Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (agama), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Poin keimanan atau agama menjadi indikator untuk menilai pencapaian spiritual masyarakat, poin jiwa untuk menilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, poin akal untuk mengukur pendidikan, poin keturunan untuk menilai karakteristik kehidupan sosial warga, dan poin harta untuk melihat kondisi perekonomian masyarakat. Kelima poin tersebut dikenal dengan istilah "*Maqashid Al-Syariah*".

Definisi *maqashid syariah* dari Muhammad bin Sa'd al-Yubi (1998) yaitu "*Maqashid al-syariah adalah makna, hikmah, dan*

sesamanya yang dijaga oleh pembuat syariat dalam hukum-hukum yang disyariatkan baik yang umum maupun yang khusus untuk memberikan kebaikan semua umat manusia”.

Imam al-Haramain diakui sebagai sarjana muslim yang menjadikan *maqashid al-syariah* dalam tiga bagian, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Dia juga diyakini sebagai orang yang membagi *dharuriyat* ke dalam lima bentuk atau *al-dharuriyat al-khams*, yaitu: *ad-din*, *an-nafs*, *al-‘aql*, *hifdzu al-budh’i*, dan *hifdzu al-mal*. Dalam pembagian ini *hifdzu ad-din* tidak muncul, namun kemudian al-Ghazali menambahkan dalam karya berikutnya dalam al-Mustashfa (al-Ghazali, 1993).

Cendekiawan muslim yang kemudian menyusun rapi *maqashid al-syariah* adalah al-Syathibi. Kontribusinya dalam *maqashid al-syariah* disejajarkan dengan Imam Syafi’i dalam kajian ilmu ushul fiqh (al-Raisuni, 2005). Bahkan sebagian ulama memposisikan al-Syathibi sebagai peletak dasar-dasar kajian *maqashid al-syariah*, karena di tangannya kajian *maqashid al-syariah* mudah dipahami dan tersusun secara rapi.

Mashlahah adalah tujuan utama dari *maqashid syariah*, yakni tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Mashlahah menurut al-Ghazali ialah memelihara tujuan syar’i, lebih lanjut ia mengatakan, “*Setiap mashlahah yang tidak kembali kepada pemeliharaan tujuan agama yang diambil dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan tidak sejalan dengan agama maka tidak*

dapat diterima (bathilah). Sedangkan mashlahah yang kembali pada pemeliharaan maqashid al-syariah yang digali dari al-Qur'an, Hadits, dan Ijma; maka dapat menjadi dasar hukum Islam. Mashlahat yang demikian bukan qiyas, melainkan mashlahah mursalah”.

Para sarjana kontemporer membagi kriteria mashlahah menjadi dua bagian, *pertama*, mashlahah itu bersifat mutlak artinya bukan relatif atau subjektif yang akan menjadi tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*, mashlahah bersifat universal (kulliyah) dan universalitas tidak bertentangan dengan sebagian (juziyyat) nya (Mas'ud, 1995).

Al-Syathibi sebagai penyelaras dari ulama-ulama sebelumnya kemudia memilah tingkatan *maqashid al-syariah* berdasarkan pada mashlahah yang bertumpu pada kepentingan untuk dipenuhinya menjadi tiga bagian:

a. Mashlahah adh-Dharuriyat

Mashlahah adh-dharuriyyah adalah hal yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh mukallaf/manusia untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti, makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya (al-Syathibi). Ada lima hal yang masuk dalam kategori adh-dharuriyyat, dan harus selalu dijaga dan dipelihara (al-Haramain, 1400):

1. Hifdzu ad-din (memelihara/menjaga agama). Agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan menjaga moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antar individu. Menurut al-Syathibi, segala perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji maka masuk dalam kepentingan agama (al-Ghazali, 1971).
2. Hifdzu an-nafs (menjaga jiwa). Islam sangat menghargai jiwa dari tiap-tiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi, dan larangan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa, Umer Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu pemerintah yang baik bagi stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan kerja, dsb.
3. Hifdzu al-'aql (menjaga akal). Menurut Umer Chapra, akal merupakan anugerah yang sangat agung yang membedakan setiap manusia dan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kemaslahatan pribadi dan orang lain. Guna meningkatkan kualitas akal yang baik harus tersedianya kualitas pendidikan yang baik juga dengan harga terjangkau, kebebasan berfikir, dan berekspresi serta memberikan penghargaan atas prestasi

kerja. Dengan akal yang sehat, manusia akan lebih tepat menggunakan ilmunya dengan baik. Teori tersebut didukung oleh Jasser Auda bahwa kesejahteraan atau kemashlahatan dibangun dengan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara mengembangkan pikiran secara ilmiah.

4. Hifdzu al-nasl/al-‘ird (menjaga atau memelihara garis keturunan). Dengan melakukan pernikahan yang resmi baik secara agama dan negara, serta tidak melakukan perzinaan. Untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, harus ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil.
5. Hifdzu al-mal (menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian). Harta juga penting untuk menunjang keempat unsur *maqashid syariah* di atas, karena tanpa harta keempat *maqashid* di atas tidak berjalan dengan baik. Menurut Chapra, ada salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Dalam memperoleh harta, Allah telah melarang keras apabila mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri, dan dengan cara yang illegal yang melanggar undang-undang suatu negara.

Masyarakat dapat merasa sejahtera apabila pemerintah dapat meningkatkan sektor perekonomian. Konsep pemeliharaan

harta dalam mencapai kehidupan yang sejahtera menurut Umer Chapra yaitu harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi keempat *maqashid syariah*. Konsep tersebut didukung dengan konsep kesejahteraan As-Syathibi yaitu memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan di akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk umat manusia. Sedangkan Jasser Auda mengembangkan penggunaan *maqashid (hifdzu al mal)* dalam bidang ekonomi, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosio ekonomi.

b. Mashlahah al-Hajiyat

Mashlahah al-hajiyat adalah sekunder, yakni sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada. Namun ketika tidak ada, juga tidak menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, tapi bisa berefek pada adanya kesulitan. Memaksakan diri keluar dari kebutuhan hajiyat justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi kebutuhan hajiyat berfungsi untuk memperluas tujuan *maqashid*. Jelasnya jika hajiyat tidak dipertimbangkan bersama dengan dharuriyat, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya hajiyat, tidaklah merusak seluruh masalahat sebagaimana dharuriyat. Sebagai contoh al-Syathibi menggambarkan dalam hubungan antar manusia adanya transaksi fiqh muamalah, qiradh, musaqah, dan salam. Secara prinsip, maksud dari konsep ini adalah

menghilangkan kesulitan, meringankan *taklif*, dan memudahkan urusan (al-Syathibi).

c. Mashlahah al-Tahsiniyyat

Mashlahah al-tahsiniyyat adalah tersier, yaitu tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat, yang bagus dan berdasar pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Al-tahsiniyyat adalah sebagai penyempurna yang bisa dilakukan atau ditinggalkan. Maslahat tahsiniyat merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Dalam muamalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dll.

Pemaparan di atas tentang *maqashid al-syariah* baik dari al-Ghazali, al-Syathibi, dan kemudian diikuti sarjana-sarjana muslim kontemporer mempunyai tujuan yang sama yaitu mensejahterakan seluruh umat manusia. Dengan beberapa fokus yang dikategorikan di atas adalah dengan tujuan muslim untuk mendekati kondisi ideal dan mampu membantu manusia meningkatkan kesejahteraan secara terus menerus (Adzkiya, 2020:23).

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah *maqashid al-syariah* itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat dengan merujuk kebahagiaan spiritual, moral, dan sosio ekonomi. Berdasar pada firman Allah:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” (Q.S. Al-Baqarah:201)

Itulah kesejahteraan hakiki yang untuk sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta.

2.2. Dana Otonomi Khusus

2.2.1 Pengertian Dana Otonomi Khusus

Menurut BPK (2021) otonomi khusus adalah wewenang khusus yang ditetapkan serta ditampilkan untuk provinsi yang mendapat otonomi khusus dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat lokal menurut usulan masing daerah berdasarkan tujuan serta kewajiban dasar masyarakat. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. (UU No.11 Tahun 2006). Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah otonomi khusus menurut (Amin, 2019) yaitu wilayah tertentu yang diberikan wewenang untuk menyusun serta mengelola kepentingan penduduk lokal berdasarkan dengan hak dan keinginan penduduk

setempat serta inisiatifnya sendiri. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah: 1) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 2) Provinsi Aceh; 3) Daerah Istimewa Yogyakarta; 4) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Istilah daerah khusus diberikan karena mendapat perlakuan istimewa berdasarkan faktor situasional di daerah tersebut. Aceh menjadi daerah khusus karena faktor agama dengan penerapan hukum syariah Islam. Landasan hukum Otonomi Khusus Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 183 ayat (1) undang-undang itu mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain itu, Pasal 183 ayat (2) menyebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 total alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 88,43 triliun rupiah.

Penerimaan dana otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh menjadikan salah satu sumber pendapatan terbesar. Pengelolaan dana otonomi khusus juga diberikan kewenangan secara penuh dari Pemerintah Pusat dengan adanya regulasi UUPA yang telah dikeluarkan. Setiap penerimaan dana otonomi khusus dari

Pemerintah Pusat, akan dilakukan transfer dana yang ditujukan pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Aceh. Penerimaan tersebut akan dianggarkan dan menjadi pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

2.2.2 Indikator Dana Otonomi Khusus

Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Republik Indonesia (2019), Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ruang Lingkup: (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Formula dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus:

- a. Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 20 tahun, yang penggunaannya terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.
- b. Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari

pagu DAU nasional, yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

- c. Besaran dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi tersebut, yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

2.2.3 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan Qanun Aceh No.2 Tahun 2008, pengalokasian dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:

- a. Paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh;
- b. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.

Sasaran Dana Otonomi Khusus Aceh dialokasikan pada tujuh bidang prioritas pemerintah Aceh, yaitu: (1) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (2) pemberdayaan ekonomi rakyat; (3) pengentasan kemiskinan; (4) pendidikan; (5) sosial; (6) kesehatan, dan (7) keistimewaan Aceh (Abdullah, 2020). Berikut

ini rincian penggunaan Dana Otonomi Khusus dialokasikan pada tujuh bidang prioritas beberapa tahun terakhir.

1. Bidang Infrastruktur rata-rata yaitu sebesar 35,90 triliun rupiah atau sekitar 44% dari total penerimaan Dana Otonomi Khusus. Program capaiannya meliputi pembangunan jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan penyeberangan, bendungan, irigasi, serta embung.
2. Bidang Pemberdayaan ekonomi rata-rata yaitu sebesar 10,26 triliun rupiah atau sekitar 13% dari total penerimaan Dana Otonomi Khusus. Adapun program capaiannya antara lain pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) pengelolaan makanan, kayu, pala, sere wangi dan nilam, pengolahan hasil laut dan perikanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh Ladong, Kawasan Industri (KI) Perikanan Lampulo, dan KEK/KI Barsela.
3. Bidang Pengentasan kemiskinan rata-rata yaitu sebesar 4,94 triliun rupiah atau sekitar 6% dari total penerimaan Dana Otonomi Khusus. Capaian dari program tersebut adalah pembangunan 11.400 rumah bagi masyarakat miskin, peningkatan produktivitas nelayan, peningkatan luas lahan masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan perkebunan kelapa sawit, dan penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan.

4. Sektor pendidikan menyumbang rata-rata yaitu sebesar 15,3 triliun rupiah atau sekitar 19% dari total penerimaan Dana Otonomi Khusus. Pencapaian tersebut antara lain: beasiswa D1-S3 untuk warga Aceh, pemberian beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa, realisasi anggaran pendidikan anak usia dini (PAUD), realisasi anggaran pendidikan dasar wajib belajar Sembilan tahun, realisasi anggaran untuk pendidikan menengah dan sebagainya, pelaksanaan anggaran pendidikan nonformal, pelaksanaan pendidikan khusus, dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Bidang sosial rata-rata yaitu sebesar 2,58 triliun rupiah atau sekitar 3% dari total penerimaan Dana Otonomi Khusus. Capaian program antara lain pemberian jaminan kesehatan oleh Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), pemberian bantuan pusat oleh Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sembako berupa Beras untuk Masyarakat Miskin (BPNT) (Raskin), mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk menangani anak terjerat hukum, memberikan bantuan sembako kepada panti asuhan, menyediakan dapur umum bagi korban bencana, santunan kesejahteraan sosial, memberikan bantuan usaha dan bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas.
6. Bidang kesehatan rata-rata yaitu sebesar 10,21 triliun rupiah atau sekitar 13% dari total penerimaan Dana Otonomi Khusus. Program capaiannya yaitu pembangunan rumah sakit dan pelaksanaan JKA.

7. Bidang keistimewaan Aceh rata-rata yaitu sebesar 1,66 triliun rupiah atau sekitar 2% dari total penerimaan Dana Otonomi Khusus. Program capaiannya yaitu pembangunan/rehabilitasi masjid, pembangunan lanskap dan infrastruktur Mesjid Raya Baiturrahman, bantuan Dayah dan balai pengajian, dan insentif imum meunasah.

Perbedaan porsi alokasi tersebut terjadi karena aturan yang terkait dengan alokasi setiap bidang belum ada dan pemerintah memprioritaskan bidang infrastruktur dalam penganggaran dana otonomi khusus daripada enam bidang lainnya.

2.3 Tingkat Pendidikan

2.3.1 Pengertian Tingkat Pendidikan

Menurut Ihsan (2011) tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan

memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan (Suryawati, 2005).

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Psacharopoulos dalam Kokila (2000) telah menekankan peranan pendidikan di dalam pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Dejanvry dan Sadoulet dalam Kokila (2000) yang menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu: dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik.

Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan segenap potensi yang ada pada peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, tingkat pendidikan atau bisa dikatakan sebagai jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal meliputi pendidikan dari keluarga dan

lingkungan, sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal.

2.3.2 Indikator Tingkat Pendidikan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pendidikan penduduk biasanya dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS); adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
3. Angka Melek Huruf (AMH); adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS); menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang ditamatkan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah

menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal.

2.3.3 Tingkat Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pendidikan atau sumber daya manusia yang berkualitas berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits maupun ijma'. Hal ini ditandai dengan banyaknya firman Allah yang berkaitan dengan manusia yang beriman dan bertakwa. Salah satu firman Allah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan bagi manusia yang beriman ialah terdapat dalam Surah Al-Mujadalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Mujadalah:11)

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat dua ciri orang yang berkualitas diantaranya pertama, beriman dan yang kedua berilmu

pengetahuan. Apabila kedua ciri tersebut ada pada seseorang maka akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi menurut Allah. Merujuk pada ayat di atas, untuk membangun perekonomian suatu negara dituntut sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang berdasarkan pada keimanan.

Secara umum, tujuan pendidikan Islam yakni menjadikan manusia sebagai insan pengabdikan kepada Tuhannya, guna membangun dan mengelola alam semesta. Hal ini mengacu pada firman Allâh:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*. (Q.S. Adh-Dhariyat:56)

Pendidikan yang baik diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Sumber daya manusia Islami adalah dimana manusia itu sendiri memiliki iman yang kuat mau berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mengurangi kemiskinan. Pendidikan dalam Islam memandang tinggi masalah SDM ini khususnya yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral), agar manusia dalam menjalankan kehidupannya terutama dalam menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullâh.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian sebelumnya merupakan salah satu panduan bagi peneliti saat melakukan penelitian yang bertujuan untuk menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari berbagai penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi bahan kajian bagi penelitian peneliti. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya berupa jurnal dan skripsi terkait penelitian yang dilakukan peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Febriaty (2021) Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Aceh. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa seiring dengan meningkatnya pemberian dana otonomi khusus maka IPM Provinsi Aceh cenderung meningkat dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2021) Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Jalan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2019. Model yang digunakan adalah data panel dengan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan

infrastruktur jalan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadafi & Murtala (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. Model penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Mantsani, dkk (2019) Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa variabel infrastruktur serta dana otonomi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliadi & Amri (2019) Penerimaan Zakat Dan Penurunan Kemiskinan Di Aceh: Peran Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. Metode analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan zakat dan dana otonomi khusus berpengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia, dkk (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat

pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan investasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Parwa & Yasa (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan adalah data analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, investasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Pangesti (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. Model analisis yang digunakan adalah analisis chi kuadrat. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina, dkk (2018) Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2015) Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan, Kinerja Ekonomi Dan

Indeks Pembangunan Manusia Regional Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya pemberian dana otonomi khusus, rata-rata mendorong laju kinerja ekonominya dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Endang Rahayu dan Hastina Febriaty (2021) Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Aceh	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pemberian dana otonomi khusus maka IPM Provinsi Aceh cenderung meningkat dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen terkait dengan dana otonomi khusus dan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait kemiskinan dan data kurun waktu penelitian.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Miftahur Rahma (2021) Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Jalan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2019	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap kemiskinan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan menggunakan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen dan ruang lingkup daerah penelitian.
3.	Muhammad Kadafi dan Murtala (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan menggunakan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen terkait dengan tingkat pendidikan dan data kurun waktu penelitian.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Muhammad Mantsani, Diah Afrah Liany Rumodar, Khadijah Syukriah, dan Sugiarto (2019) Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel infrastruktur serta dana otonomi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan menggunakan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen dan data kurun waktu penelitian.
5.	Muliadi dan Khairul Amri (2019) Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan zakat dan dana otonomi khusus berpengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan menggunakan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen terkait dengan tingkat pendidikan dan data kurun waktu penelitian.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Rizky Muhammad Aulia, Herlith, Siti Nurjanah (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan menggunakan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen terkait dengan dana otonomi khusus dan daerah penelitian.
7.	I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa dan I Gusti Wayan Murjana Yasa (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, investasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan menggunakan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen terkait dengan dana otonomi khusus dan daerah penelitian.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
8.	Rudy Susanto dan Indah Pengesti (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan menggunakan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen terkait dengan dana otonomi khusus dan daerah penelitian.
9.	Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, dan Abubakar Hamzah (2018) Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen terkait dengan dana otonomi khusus dan waktu penelitian.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10.	Ratna (2015) Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan, Kinerja Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Regional Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh	Kuantitatif	Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya pemberian dana otonomi khusus, rata-rata mendorong laju kinerja ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, namun belum mampu mereduksi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan laju perkembangan IPM.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel dependen terkait dengan kemiskinan dan menggunakan metode perolehan data yang sama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen terkait dengan tingkat pendidikan dan data kurun waktu penelitian.

Sumber: Data diolah (2022)

2.5 Keterkaitan Antar Variabel

2.5.1 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan

Alokasi DOK pada aktivitas pertumbuhan kepada provinsi ataupun kabupaten kota dianjurkan pada peningkatan keamanan penduduk serta untuk turunya kemiskinan (Muliadi & Amri, 2019). Menurut Mantsani (2020) pada dasarnya dana otonomi

khusus khusus dapat memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori, jika dana otonomi khusus meningkat, maka kemiskinan akan menurun dan begitu pula sebaliknya jika dana otonomi khusus menurun, maka kemiskinan akan meningkat. Dimana melalui dana transfer yang diserahkan bagi pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan misalnya melalui dana pendidikan yang berdampak langsung terhadap penduduk miskin. Secara terus-menerus melalui otonomi daerah, pemerintah pusat telah membuat kebijakan dan kontribusi kepada masyarakat baik itu tunai ataupun non-tunai (Ferdiansyah, 2018). Otonomi khusus Aceh dipandang dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat apabila didorong oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

2.5.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Pendidikan diakui secara luas bahwa memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Bloom, 2006).

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di Negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang

dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2010).

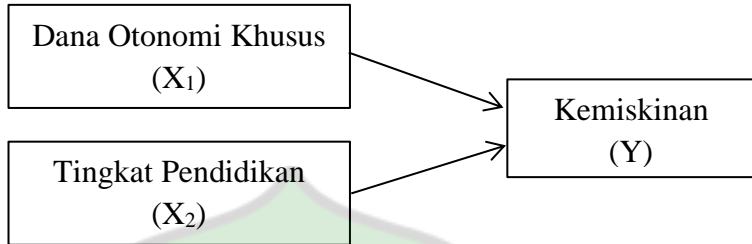
Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Psacharopoulos dalam Kokila (2000), telah menekankan peranan pendidikan di dalam pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Berdasarkan teori, jika tingkat pendidikan meningkat, maka kemiskinan akan menurun. Hal ini sejalan dengan Dejanvry dan Sadoulet dalam Kokila (2000) yang menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung yaitu dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan menurun, maka akan meningkatkan kemiskinan sebab tingkat pendapatan yang rendah.

2.6 Kerangka Berpikir

Variabel dependen untuk penelitian ini yaitu Kemiskinan (Y) serta untuk variabel independen yaitu Dana Otonomi Khusus (X_1) dan Tingkat Pendidikan (X_2). Adapun rumusan kerangka dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran Penelitian Kuantitatif



Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 2.1, dapat diketahui bahwa yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pengaruh dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan. Maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan (X).
2. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini adalah kemiskinan (Y).

2.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010) hipotesis adalah jawaban dugaan awal kepada rumusan masalah diteliti, rumusan masalah yang diteliti sudah diakui berupa kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang diajukan sebagai dugaan awal adalah sebagai berikut:

H_{a1} : Dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

H_{01} : Dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

H_{a2} : Dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kemiskinan.

H_{02} : Dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

H_{a3} : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan.

H_{03} : Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu sebuah pendekatan yang memandang persoalan sosial atau gejala sosial apa adanya berdasarkan kondisi riil yang ada, tanpa mempertanyakan persoalan sosial tersebut. Masalah dalam penelitian kuantitatif bersifat konstan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan penelitian evaluasi yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan dukungan dan masukan untuk pengambilan keputusan tentang nilai *relative* dari satu atau lebih. (Seran, 2020).

3.2 Sumber dan Teknik Perolehan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Dengan kata lain, data sekunder merupakan data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya atau mengambil data yang sudah tersedia di instansi-instansi tertentu dalam bentuk laporan. Data sekunder tersebut digunakan dalam bentuk data panel yaitu gabungan antara data seri waktu (*time series*) dan data wilayah (*cross section*).

Menurut Nuryanto dan Pambuko (2018), data panel terdiri dari data beberapa objek dan meliputi beberapa waktu. Adapun

populasi dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data Dana Otonomi Khusus, tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan tahun 2017-2021.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu nilai, objek atau kegiatan yang memiliki varian tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi sehingga menjadi akibat karena terdapat variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016).

3.3.1 Kemiskinan sebagai Y

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi sehingga menjadi akibat karena terdapat variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan di Provinsi Aceh. Menurut Adelfina (2016) kemiskinan adalah masalah yang sangat penting sebab kemiskinan berawal dari ketidakmampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehingga menyebabkan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan diabaikan.

3.3.2 Dana Otonomi Khusus sebagai X₁

Menurut BPK (2021) otonomi khusus adalah wewenang khusus yang ditetapkan serta ditampilkan untuk provinsi yang mendapat otonomi khusus dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat lokal menurut usulan masing daerah berdasarkan tujuan serta kewajiban dasar masyarakat. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. (UU No.11 Tahun 2006).

3.3.3 Tingkat Pendidikan sebagai X₂

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, tingkat pendidikan atau bisa dikatakan sebagai jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal meliputi pendidikan dari keluarga dan lingkungan, sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal.

Tabel 3.1
Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Varia bel	Definisi	Indikator	Satuan Ukur	Skala
Dana Otonomi Khusus (X ₁)	Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. (UU No.11 Tahun 2006).	Data Dana Otonomi Khusus 2008-2021 Rumus: $Y_{it} = \alpha + \beta \ln \text{LogO}$ $\text{TSUS}_{it} + e$	Rupiah/ka pita	Rasio
Tingkat Pendidikan (X ₂)	Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, tingkat pendidikan atau bisa dikatakan sebagai jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.	Rata-rata lama sekolah Rumus: $\text{RLS} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Tahun	Rasio

Tabel 3.1 - Lanjutan

Variabel	Definisi	Indikator	Satuan Ukur	Skala
Kemiskinan (Y)	Menurut Adelfina (2016), kemiskinan adalah masalah yang sangat penting sebab kemiskinan berawal dari ketidakmampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehingga menyebabkan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan diabaikan.	Rasio jumlah penduduk miskin Rumus: $P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]$	Persen	Rasio

Sumber: Data diolah (2022)

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

3.4.1 Model Regresi Data Panel

Gujarati (2004) berpendapat data panel artinya perpaduan dari *data cross-section* serta *time series*. *Time series* yaitu rangkaian pengamatan nilai-nilai yang di ambil suatu variabel pada waktu yang berbeda. Selanjutnya data *cross section* yaitu data memiliki banyak variabel yang dihimpun pada lokasi sejenis.

Pada penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu variabel persentase kemiskinan (Y) dan dua variabel independen

yaitu dana otonomi khusus (X_1) dan tingkat pendidikan (X_2).

Berikut model persamaan data panel:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y_{it} : variabel dependen

α : konstanta

β_1 : koefisien regresi

X : variabel independen

e : *error term*

t : waktu

i : individu

Untuk persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 OTSUS_{1it} + \beta_2 TPM_{2it} + e_{it} \quad (2)$$

Keterangan:

Y_{it} : persentase kemiskinan (persen)

α : konstanta

$OTSUS_{1it}$: dana otonomi khusus di daerah i waktu t (rupiah)

TPM_{2it} : tingkat pendidikan masyarakat di daerah i waktu t (tahun)

$\beta_1 \beta_2$: koefisien variabel independen

e_{it} : *error term* di kabupaten/kota waktu t

Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan regresi, maka harus dibuat dengan

model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural menurut Ghozali (2005) adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari adanya heteroskedastisitas
- b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
- c. Mendekatkan skala data

Sehingga persamaan penelitian dengan logaritma natural adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogOTSUS}_{1it} + \beta_2 \text{LogTPM}_{2it} + e \quad (3)$$

3.4.2 Model Estimasi Data Panel

Pada model estimasi menggunakan tiga model yaitu *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model* serta *Common Effect Model*. Berikut tinjauan ketiga model estimasi tersebut:

a. *Common Effect Model*

Menurut Widarjono (2013) model estimasi *common effect* yaitu teknik estimasi yang semuanya dapat diandalkan untuk memperkirakan data panel dengan menggabungkan data *time series* dengan data *cross-section*.

b. *Fixed Effect Model*

Menurut Gujarati (2012) model *fixed effect* adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda setiap subjek sedangkan *slope* tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel *dummy* (Kuncoro, 2012).

c. *Random Effect Model*

Menurut Kuncoro (2012) *random effect* disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan *random* yang dispesifikasikan dalam bentuk residual. Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek.

3.4.3 Uji Spesifikasi Model

Dalam penelitian ini terdapat uji yang dilakukan untuk menentukan teknik evaluasi data panel yang paling tepat untuk memilih model yang terbaik, yaitu:

a. Uji statistic F (*Uji Chow*)

Menurut Widarjono (2009) Uji Chow merupakan tes untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow yaitu:

H_0 : *common effect* adalah model terbaik

H_1 : *fixed effect* adalah model terbaik

Signifikansi yang digunakan untuk α adalah 5% (0.05). apabila prob. *cross-section* F uji Chow lebih rendah dari α 5% (0.05) sehingga H_1 diterima berarti model yang akan dipakai dalam estimasi model regresi yaitu *fixed effect*. Akan tetapi, jika prob. *cross-section* F uji Chow lebih tinggi dari α 5% (0.05) selanjutnya H_0 diterima yang berarti estimasi model regresi yang dipakai yaitu *common effect*.

b. Uji Hausman

Menurut Widarjono (2013) Uji hausman digunakan dalam perbandingan model *fixed effect* dengan *random effect*. Berikut hipotesis pada uji Hausman:

H_0 : *random effect* merupakan terbaik

H_1 : *fixed effect* merupakan terbaik

Signifikansi yang digunakan untuk α adalah 5% (0.05). Jika nilai statistik hausman tinggi dari nilai prob. α 5% (0.05) sehingga H_0 diterima artinya penentuan model estimasi regresi menggunakan *random effect*. ketika nilai statistik hausman rendah dari nilai tabel prob. dengan α 5% (0.05) selanjutnya H_1 diterima artinya model yang dipakai yaitu *fixed effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Menurut Widarjono (2013) Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih antara kedua model yaitu model *common effect* dan *random effect*. Hipotesis dari uji Lagrange Multiplier adalah jika:

H_0 : *common effect* merupakan terbaik

H_1 : *random effect* merupakan terbaik

Signifikansi yang digunakan untuk α adalah 5% (0,05). Jika nilai p-value lebih kecil dari nilai prob. A 5% (0,05) sehingga H_0 diterima artinya penentuan model estimasi regresi menggunakan *common effect*, ketika nilai p-value lebih besar dari nilai prob. A

5% (0,05) selanjutnya H_1 diterima artinya model yang terbaik adalah *random effect*.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi statistik yang harus dilakukan pada metode analisis regresi berganda dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun simultan (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.5.1 Uji Normalitas

Menurut Sunyoto (2016) uji normalitas akan meneliti data variabel independen (X) serta data variabel dependen (Y) dalam persamaan regresi yang diperoleh. Berikut untuk menemukan apakah residual pada penelitian ini berdistribusi normal ataupun tidak melalui pengamatan nilai prob. pada tabel menggunakan signifikansi $\alpha = 5\%$ (0.05).

H_0 : data tidak normal

H_1 : data normal

- a) Apabila nilai prob. > 0.05 , maka residualnya berdistribusi normal terima H_1
- b) Apabila nilai prob. < 0.05 , maka residualnya tidak berdistribusi normal diterima H_0

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Sunyoto (2016) jenis uji hipotesis multikolinearitas ini cocok untuk analisis regresi berganda. Terdapat dua variabel

independen dalam melakukan penelitian. Kedekatan hubungan antar variabel independen akan diukur Melalui ukuran koefisien korelasi (r). Konsekuensi multikolinearitas yaitu tidak validnya signifikansi variabel ataupun besaran koefisien variabel dan konstanta. Multikolinearitas diduga terjadinya ketika estimasi memiliki hasil nilai R (kuadrat) lebih besar dari 0,8, nilai-t dan nilai f statistik lebih besar maka tidak signifikan (Gujarati, 2003).

Hipotesis:

H_0 : terdapat multikolinearitas

H_1 : tidak terdapat multikolinearitas

- a) Apabila pada uji nilai matrix nya $> 0,8$ maka terdapat multikolinearitas (H_0 diterima)
- b) Apabila pada uji nilai matrix nya $< 0,8$ maka tidak ada multikolinearitas (H_1 diterima)

3.5.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Gejala ini sering terjadi pada data *cross section* (Gujarati, 2012), sehingga sangat memungkinkan terjadi heterokedastisitas pada data panel. Persamaan yang baik yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas. Hipotesis:

H_0 : terdapat heteroskedastisitas

H_1 : tidak terdapat heteroskedastisitas

- a) Apabila nilai prob. $< 0,05$ sehingga data tersebut memiliki heteroskedastisitas (H_0 diterima).

- b) Apabila nilai prob. $> 0,05$ sehingga data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas (H_1 diterima).

3.6 Uji Hipotesis

Menurut Basuki (2016) hipotesis adalah ungkapan tentang sifat populasi, selanjutnya uji hipotesis merupakan rangkaian dalam membuktikan validitas tentang karakteristik populasi menurut data sampel. Berikut uji hipotesis dilakukan:

3.6.1 Uji T-statistik

Menurut Kuncoro (2011) uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikan atau tidak yaitu dengan membandingkan probabilitasnya dengan signifikan $\alpha = 5\%$ (0.05).

Hipotesis pada uji t yaitu:

- a) $H_0: \beta_1 \neq 0$ tidak berpengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b) $H_1: \beta_1 = 0$ berpengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Kriteria pada uji t:

- a) Jika nilai prob. $> \alpha = 5\%$ (0.05) sehingga H_1 ditolak atau diterima H_0
- b) Jika nilai prob. $< \alpha = 5\%$ (0.05) sehingga H_1 diterima atau ditolak H_0

3.6.2 Uji F-statistik

Menurut Ghozali (2011) Uji statistik F digunakan untuk membuktikan apakah seluruh variabel independen yang dikategorikan pada model memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Metode digunakan dalam mengamati besar kecilnya nilai probabilitas signifikan. Dalam hal jika nilai prob. signifikansi lebih rendah dari 5% sehingga variabel independennya simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis yang dipakai pada Uji F yaitu sebagai berikut:

- a) H_0 : secara simultan variabel independen dengan variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan
- b) H_1 : secara simultan variabel independen dengan variabel dependen mempunyai pengaruh yang signifikan

Kriteria pada uji F:

- a) Jika nilai Prob. tinggi dari $\alpha = 5\%$ (0.05) sehingga diterima H_0 bisa dikatakan secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai Prob. lebih rendah dari $\alpha = 5\%$ (0.05) sehingga diterima H_1 bisa dijelaskan secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Widarjono (2009) uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Menurut Kuncoro (2011) nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar

di antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang besar atau mendekati satu artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Provinsi Aceh

Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatera antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh meliputi sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia (BPS, 2022).

**Gambar 4.1
Peta Provinsi Aceh**



Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh (2022)

Provinsi Aceh memiliki 23 Kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, dan 6.515 desa. Provinsi Aceh memiliki luas sebesar 5.677.081 ha, hutan merupakan lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti dengan lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Cakupan wilayah Aceh terdiri dari 199 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai utama.

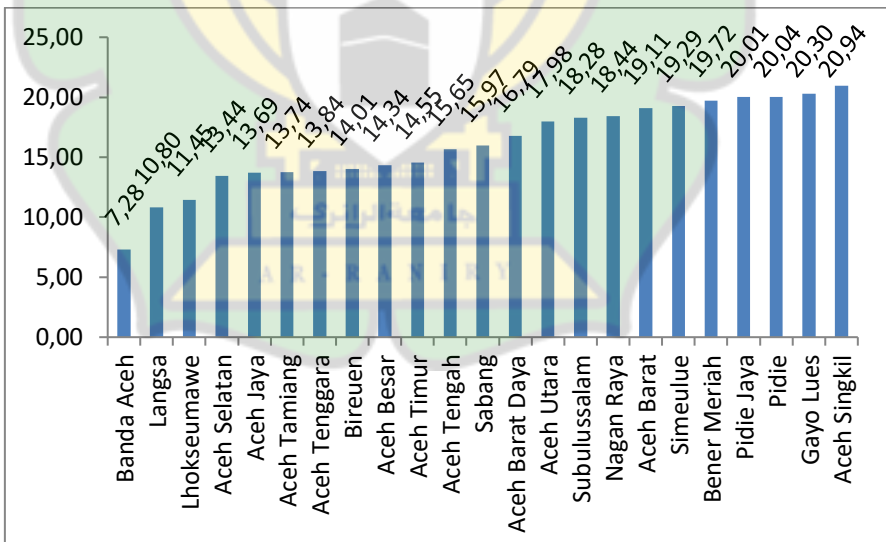
Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.407.855 jiwa. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan diberi kewenangan otonomi khusus. Provinsi Aceh mempunyai beragam kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, sektor pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, pertambangan umum yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

4.2 Analisa Deskriptif

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Andiny dan Mandasari, 2017). Beik (2016) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh individu yang tidak mempunyai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritualitas.

Persentase penduduk miskin Provinsi Aceh menurut BPS (2020) dari tahun 2012-2020 fluktuatif dan cenderung menempati posisi pertama dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera. Provinsi Aceh memiliki banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan Provinsi Aceh juga dikenal memiliki sumber daya alam yang kaya, namun masih belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Agar memudahkan melihat persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota Provinsi Aceh pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi
Aceh 2017-2021



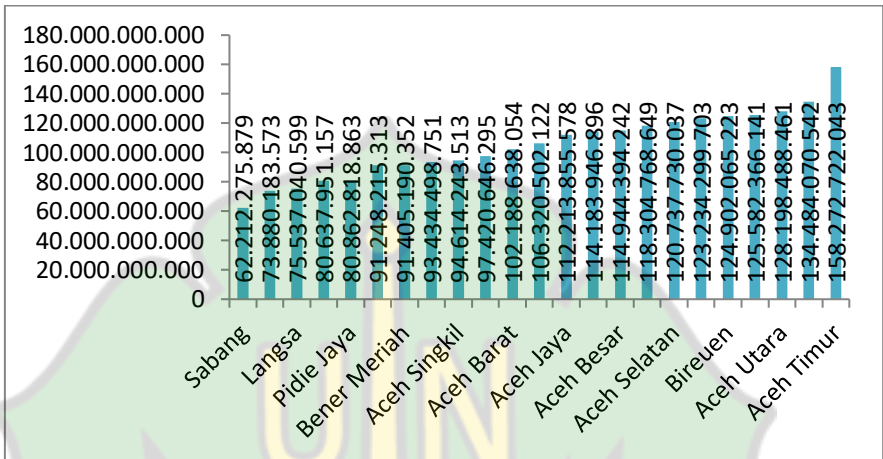
Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah 2023)

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan pada tahun 2017-2021 di Provinsi Aceh mengalami perubahan di setiap tahunnya. Daerah yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Aceh Singkil yaitu sebesar 20,94% dan daerah yang memiliki persentase kemiskinan terendah adalah Kota Banda Aceh yaitu sebesar 7,28%.

Menurut BPK (2021) otonomi khusus adalah wewenang khusus yang ditetapkan serta ditampilkan untuk provinsi yang mendapat otonomi khusus dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat lokal menurut usulan masing daerah berdasarkan tujuan serta kewajiban dasar masyarakat. Daerah Otonomi Khusus Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini menggunakan data Dana Otonomi Khusus yang diperoleh langsung dari Bappeda Aceh. Berikut dapat dilihat grafik rata-rata Dana Otonomi Khusus di setiap kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2008-2021.

Gambar 4.3
Rata-Rata Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi
Aceh 2008-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah 2023)

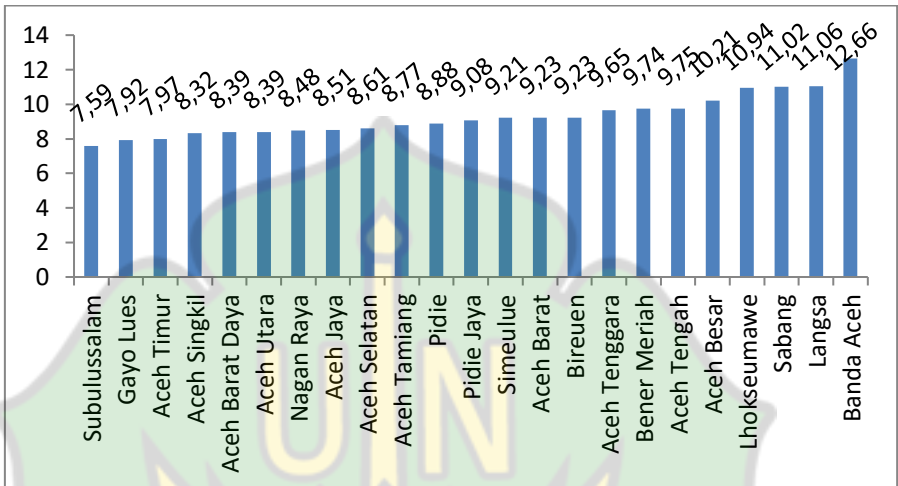
Berdasarkan hasil gambar 4.3, pertumbuhan rata-rata dana otonomi khusus di setiap kabupaten/kota Provinsi Aceh mengalami perubahan setiap tahunnya. Rata-rata penerimaan dana otonomi khusus tertinggi diterima oleh Kabupaten Aceh Timur yaitu sebesar Rp158.272.722.043,- dan rata-rata penerimaan dana otonomi khusus terendah diterima oleh Kota Sabang yaitu sebesar Rp62.212.275.879,-.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, tingkat pendidikan atau bisa dikatakan sebagai jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Terdapat tiga jalur pendidikan

yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal meliputi pendidikan dari keluarga dan lingkungan, sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal.

Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tujuannya untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pendidikan ialah rata-rata lama sekolah. Faktor ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang ditamatkan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal. Berikut adalah data rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh dari tahun 2017 hingga 2021.

Gambar 4.4
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh
Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah 2023)

Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Berdasarkan grafik 4.2 terlihat bahwa nilai rata-rata lama sekolah yang paling tinggi di Provinsi Aceh diperoleh oleh Kota Banda Aceh yaitu selama 12,66 tahun dan yang paling rendah berada pada Kota Subulussalam yaitu selama 7,59 tahun.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

	Statistik Deskriptif		
	Kemiskinan (%)	Dana Otonomi Khusus/kapita (Rp)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Mean	16.07235	726.440	9.287130
Maximum	22.11000	2.330.589	12.83000
Minimum	6.900000	199.542	7.120000

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah 2023)

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa dana otonomi khusus, rata-rata lama sekolah, dan kemiskinan setiap wilayah Aceh relatif berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada antar kabupaten/kota dalam waktu yang berbeda. Hasil deskriptif terhadap kemiskinan memiliki rata-rata sebesar 16,07%. Kemiskinan tertinggi sebesar 22,11% di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 dan kemiskinan terendah sebesar 6,90% di Kota Banda Aceh pada tahun 2020.

Hasil deskriptif terhadap dana otonomi khusus memiliki rata-rata sebesar Rp726.440,-. Dana otonomi khusus tertinggi sebesar Rp2.330.589,- bagi Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2017 dan dana otonomi khusus terendah sebesar Rp199.542,- bagi Kota Aceh Utara pada tahun 2019.

Hasil deskriptif terhadap tingkat pendidikan dari segi rata-rata lama sekolah memiliki rata-rata sebesar 9,28 tahun. Tingkat

pendidikan tertinggi selama 12,83 tahun di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 dan tingkat pendidikan terendah selama 7,12 tahun di Kota Subulussalam pada tahun 2017.

4.3.2 Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menentukan sejauh mana pergerakan dua variabel yang berbeda dikaitkan. Hasil koefisien korelasi antar ketiga variabel dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Koefisien Korelasi

Variabel	Koefisien Korelasi		
	MSK	DOK	PDK
MSK	1		
DOK	0,314	1	
PDK	-0,652	-0,163	1

Sumber: *Output Eviews 12(Data diolah 2023)*

Keterangan:

MSK : Tingkat Kemiskinan

DOK : Dana Otonomi Khusus

PDK : Tingkat Pendidikan

Pada tabel 4.2 menunjukkan korelasi antar setiap variabel. Kemiskinan berhubungan positif dengan dana otonomi khusus dan sebaliknya berhubungan negatif dengan tingkat pendidikan. Hal tersebut memperlihatkan nilai koefisien korelasi setiap variabel

sebesar 0,314 dan -0,652. Nilai tersebut menandakan bahwa adanya hubungan searah di satu sisi antara kemiskinan dengan dana otonomi khusus dan adanya hubungan tidak searah di sisi lain dengan tingkat pendidikan. Peningkatan dana otonomi khusus di setiap Kabupaten/kota Provinsi Aceh dapat meningkatkan kemiskinan secara umum. Sedangkan peningkatan tingkat pendidikan di setiap kabupaten/kota Provinsi Aceh tidak dapat meningkatkan kemiskinan secara umum.

Hubungan koefisien korelasi antara dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan bernilai negatif dengan hasil koefisien korelasi pada tabel 4.4 di atas sebesar -0,163. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan dana otonomi khusus secara langsung tidak dapat meningkatkan tingkat pendidikan.

4.3.3 Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Berikut hasil estimasi model regresi:

1. Common Effect Model

Model estimasi regresi data panel yang paling sederhana merupakan model *common effect*. Hasil estimasi model *common effect* dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG (DOK)	1.354968	0.429075	3.157884	0.0020
PDK	-1.781119	0.206031	-8.644907	0.0000
C	14.56715	6.395809	2.277608	0.0246

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah 2023)

Keterangan:

LOG (DOK) : logaritma Dana Otonomi Khusus

PDK : Tingkat Pendidikan

C : koefisien

Berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada tabel 4.3 di atas maka model umum *common effect model* yaitu:

$$MSK_{it} = 14,567 + 1,354DOK_{it} - 1,781PDK_{it} + e \quad (1)$$

2. Fixed Effect Model

Model estimasi regresi data panel *fixed effect model* merupakan estimasi regresi yang menunjukkan perbedaan konstan antar objek. Hasil estimasi *fixed effect model* dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG (DOK)	0.622619	0.353141	1.763091	0.0813
PDK	-2.380668	0.331278	-7.186318	0.0000
C	29.88932	7.137269	4.187781	0.0001

Sumber: Output Eviews 12 Data diolah (2023)

Keterangan:

LOG (DOK) : logaritma Dana Otonomi Khusus

PDK : Tingkat Pendidikan

C : koefisien

Berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada tabel 4.4 di atas maka model umum *fixed effect model* yaitu:

$$MSK_{it} = 29,889 + 0,622DOK_{it} - 2,380PDK_{it} + e \quad (2)$$

3. Random Effect Model

Model estimasi regresi data panel *random effect model* merupakan estimasi regresi yang menunjukkan perbedaan karakteristik individu dan waktu yang diakomodasikan pada *error* dari model. Hasil *random effect model* dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG (DOK)	0.795838	0.316942	2.510986	0.0135
PDK	-2.177321	0.272411	-7.992782	0.0000
C	25.69373	6.105424	4.208345	0.0001

Sumber: Output Eviews 12 Data diolah (2023)

Keterangan:

LOG (DOK) : logaritma Dana Otonomi Khusus

PDK : Tingkat Pendidikan

C : koefisien

Berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada tabel 4.5 di atas maka model umum *random effect model* yaitu:

$$MSK_{it} = 25,693 + 0,795DOK_{it} - 2,177PDK_{it} + e \quad (3)$$

4.3.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model analisis digunakan untuk menganalisis pengaruh dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan adalah regresi panel. Model pengolahan data tersebut terdiri dari tiga pendekatan yakni *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dalam memilih pendekatan sebagai alat estimasi yang paling tepat untuk digunakan antara tiga pendekatan, maka digunakan *Chow test* dan *Hausman test*. *Chow*

test digunakan untuk menentukan apakah menggunakan model *common effect* atau *fixed effect*, sedangkan *Hausman test* digunakan dalam memilih model apakah yang paling tepat antara model *fixed effect test* atau *random effect test*.

1. Uji *Chow Test* (uji F-statistik)

Uji *chow test* digunakan untuk memilih model apakah yang akan dipakai *common effect* atau *fixed effect* didasarkan pada nilai *p-value* untuk *cross-section F* dengan ketentuan jika *p-value* > 0,05 maka model yang terpilih adalah *common effect*. Sebaliknya jika *p-value* < 0,05 dari hasil tersebut maka model terpilih adalah *fixed effect*. Hasil uji *Chow test* ditunjukkan dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji *Chow Test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	124,281695	(22,90)	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12 (Data diolah 2023)*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai *p-value cross section F* sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa statistik H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu berdasarkan hasil uji *chow test* model estimasi yang dipilih adalah *fixed effect model*.

2. Uji *Hausman Test*

Uji *hausman test* digunakan dalam memilih model apakah yang akan dipakai *fixed effect* atau *random effect*. Penentuan dari

kedua model tersebut dapat dilihat pada nilai *p-value cross-section random* dengan ketentuan jika nilai *p-value* > 0,05 maka model yang dipilih adalah *random effect*. Sebaliknya jika nilai *p-value* < 0,05 maka model yang terpilih adalah *fixed effect*. Hasil uji *Hausman test* seperti ditunjukkan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chid-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.262189	2	0.5320

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah 2023)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil nilai *p-value cross section random* sebesar $0,5320 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa statistik H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu berdasarkan hasil uji *hausman test* model estimasi yang dipilih adalah *random effect model*.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Uji *Lagrange Multiplier* merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih antara kedua model yaitu model *common effect* dan *random effect*. Asumsinya bahwa apabila hasil uji LM menunjukkan nilai *p-value Breusch Pagan* > 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect model* dan sebaliknya apabila nilai *p-value Breusch Pagan* < 0,05 maka model yang dipilih

adalah *random effect model*. Berikut adalah hasil uji LM pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	211.1381	0.850959	211.9890
	(0.0000)	(0.3563)	(0.0000)

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah 2023)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji *lagrange multiplier* di atas dapat dilihat bahwa nilai *p-value Breusch Pagan* sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *p-value Breusch Pagan* $< 0,05$ sehingga model yang terbaik yang harus digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

4.3.5 Model Regresi Data Panel Terpilih

Berdasarkan pada pemilihan model regresi maka model yang terpilih adalah *random effect model*. Hasil dari model regresi *random effect model* dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Hasil *random effect model* Sebagai Model Regresi Terpilih

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG (DOK)	0.795838	0.316942	2.510986	0.0135
PDK	-2.177321	0.272411	-7.992782	0.0000
C	25.69373	6.105424	4.208345	0.0001

Sumber: *Output Eviews 12 (2023)*

Keterangan:

LOG (DOK) : logaritma Dana Otonomi Khusus

PDK : Tingkat Pendidikan

C : koefisien

Berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada tabel 4.9 di atas maka persamaan model umum *random effect model* yaitu:

$$MSK_{it} = 25,693 + 0,795DOK_{it} - 2,177PDK_{it} + e \quad (4)$$

Dari persamaan tersebut dapat dianalisis bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Pengaruh tersebut didasarkan oleh koefisien estimasi sebesar 0,795 (p-value = 0,0135 < 0,05). Berdasarkan angka tersebut dapat diartikan bahwa setiap peningkatan dana otonomi khusus sebesar 1% dapat meningkatkan

kemiskinan sebesar 0,795 dengan asumsi tingkat pendidikan tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa dana otonomi khusus yang diterima daerah Kabupaten/kota Provinsi Aceh belum mampu berkontribusi secara nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Pengaruh tersebut didasarkan oleh koefisien estimasi sebesar -2,177 ($p\text{-value} = 0,0000 < 0,05$). Berdasarkan angka tersebut dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1% dapat menurunkan kemiskinan sebesar 2,177. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan berkontribusi secara nyata dalam pengentasan kemiskinan.

4.4 Uji Asumsi Klasik

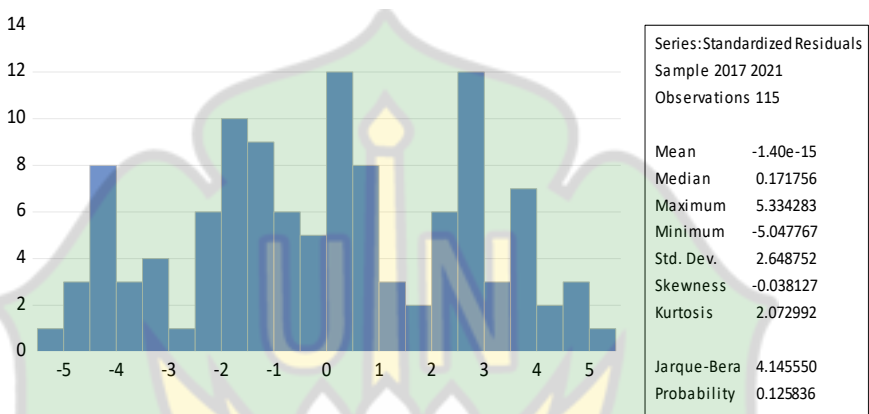
Pengujian asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Maka hasil dari uji asumsi penelitian ini sebagai berikut.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji nilai *residual* yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya (Purnomo, 2017). Asumsinya bahwa apabila nilai probabilitas Jarque-Bera (JB) $> 0,05$ maka residual berdistribusi normal atau dengan kata lain H_0 ditolak. Sebaliknya apabila nilai

probabilitas Jarque-Bera (JB) < 0,05 maka residual berdistribusi tidak normal atau dengan kata lain H_0 diterima. Berikut adalah hasil uji normalitas pada gambar 4.5.

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas



Sumber: *Output Eviews 12 (2023)*

Berdasarkan gambar 4.5 hasil uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 4,145550 dan nilai probabilitas sebesar 0,125836. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05 sehingga dapat dikatakan residual berdistribusi normal atau dengan kata lain H_0 ditolak.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah antara variabel independen memiliki hubungan atau tidak. Pengujian ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai adjusted- R^2 yang diperoleh dari proses regresi dengan nilai koefisien korelasi (r) antara sesama variabel independen. Multikolinearitas terjadi apabila nilai korelasi di atas 0,90. Apabila nilai korelasi di

bawah 0,90 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Koefisien Korelasi	
	LOG (DOK)	PDK
LOG (DOK)	1	-0,206
PDK	-0,206	1

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah 2023)

Keterangan:

LOG (DOK) : logaritma Dana Otonomi Khusus

PDK : Tingkat Pendidikan

Pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0,20. Oleh sebab itu, maka data pada penelitian ini dapat diartikan tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna melihat varian residuan dengan asumsi pengujian sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_1 : Terdapat heteroskedastisitas

Pengujian ini menggunakan uji *Glejser* yaitu meregresikan variabel independen dengan nilai absolut. Hasil uji *glejser* dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Nilai Uji Glejser

No	Variabel	Probability
1	Dana Otonomi Khusus (DOK)	0.2399
2	Tingkat Pendidikan (PDK)	0.0238

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah 2023)

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil nilai *probability* dari variabel dana otonomi khusus $> 0,05$ dan variabel tingkat pendidikan $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan terbebas dari heteroskedastisitas.

4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian hipotesis parsial, hipotesis berganda dan koefisien determinasi. Berdasarkan estimasi regresi *random effect model* yang terpilih.

Tabel 4.12
Uji Hipotesis Berdasarkan Model Regresi Terpilih

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DOK)	0.795838	0.316942	2.510986	0.0135
RLS	-2.177321	0.272411	-7.992782	0.0000
C	25.69373	6.105424	4.208345	0.0001
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.715363	0.9644
Idiosyncratic random			0.521665	0.0356
Weighted Statistics				

Root MSE	0.513117	R-squared	0.567530
Mean dependent var	1.375819	Adjusted R-squared	0.559807
S.D. dependent var	0.783674	S.E. of regression	0.519944
Sum squared resid	30.27830	F-statistic	73.48877
Durbin-Watson stat	1.310156	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.451005	Mean dependent var	16.07235
Sum squared resid	799.8114	Durbin-Watson stat	0.049598

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah 2023)

4.5.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial uji t dilakukan dengan kriteria apabila nilai signifikan probabilitas $< 0,05$ maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikan probabilitas $> 0,05$ maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikan probabilitas dilihat pada hasil output regresi dengan model *random effect model* pada tabel 4.12. Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Hipotesis pertama (H1)

Berdasarkan hasil output regresi dengan model *random effect model* pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai signifikan probabilitas sebesar $0,0135 < 0,05$. Maka hasil tersebut menyatakan H1 diterima, berarti dana otonomi khusus secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

b. Hipotesis kedua (H2)

Berdasarkan hasil output regresi dengan model *random effect model* pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai signifikan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hasil tersebut menyatakan H2 diterima, berarti tingkat pendidikan secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

4.5.2 Pengujian Hipotesisi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan membandingkan F statistik dengan F Tabel pada signifikan 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian ini sebagai berikut:

- a. Jika $F \text{ hitung} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F \text{ hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil output regresi dengan model *random effect model* pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hasil tersebut menyatakan H_0 ditolak, dapat disimpulkan dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan tingkat kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini nilai R^2 yang diperoleh dalam estimasi regresi *random effect model* pada tabel 4.12 sebesar 0,5598 atau 55,98%. Nilai R^2 tersebut menunjukkan kemampuan dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan menerangkan kemiskinan sebesar 55,98%.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas menunjukkan nilai prob sebesar $0,0135 < 0,05$ sedangkan nilai koefisien untuk variabel dana otonomi khusus sebesar 0.795838. Hasil tersebut menandakan bahwa dana otonomi khusus berhubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hal ini berarti penambahan transfer dana otonomi khusus meningkatkan persentase penduduk miskin. Sebabnya adalah pemerataan pemberian dana otonomi khusus di masing-masing kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan yang besar. Ini dibuktikan data dana otonomi khusus yang ditransfer. Rata-rata penerimaan dana otonomi khusus sejak tahun 2008 hingga 2021 bagi Kota Sabang hanya sebesar 62 milyar sedangkan rata-rata penerimaan dana otonomi khusus tertinggi diterima oleh Kabupaten Aceh Timur yaitu sebesar 158 milyar. Terjadinya ketimpangan ini berdampak pada pembiayaan masing-masing

kabupaten/kota untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga transfer yang dilakukan tidak efektif yang berakibat tidak menurunkan kemiskinan namun menambah kemiskinan meskipun tidak signifikan.

Adanya dana otonomi khusus bagi daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh seharusnya berdampak pada kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Dana otonomi khusus merupakan transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk dana desentralisasi. Dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa dana otonomi khusus merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan untuk pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan. Penggunaan dana otonomi khusus oleh pemerintah Aceh tidak hanya diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, tetapi juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Seharusnya penerapan *maqashid syariah* yaitu dalam *hifdzu al-mal* (menjaga harta) dapat terwujud jika alokasi dana otonomi khusus berjalan dengan baik dimana dengan adanya dana otonomi khusus diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh. Masyarakat dapat merasa sejahtera apabila pemerintah dapat meningkatkan sektor perekonomian. Konsep pemeliharaan harta dalam mencapai kehidupan yang sejahtera menurut Umer Chapra yaitu harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi

keempat *maqashid syariah*. Konsep tersebut didukung dengan konsep kesejahteraan As-Syathibi yaitu memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan di akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk umat manusia. Sedangkan Jasser Auda mengembangkan penggunaan *maqashid (hifdzu al mal)* dalam bidang ekonomi, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosio ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahma (2021) yang menyimpulkan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang diteliti oleh Kadafi & Murtala (2020) bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

4.6.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas menunjukkan nilai prob sebesar $0,0000 < 0,05$ sedangkan nilai koefisien untuk variabel tingkat pendidikan sebesar $-2,177321$. Artinya setiap kenaikan 1 tahun tingkat pendidikan dapat menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Aceh sebesar $2,177321\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2017-2021.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah, pendidikan atau sumber daya yang berkualitas sangat diperlukan karena untuk

membangun perekonomian suatu bangsa dan negara manusia dituntut berilmu pengetahuan yang didasarkan pada keyakinan (iman). Apabila suatu bangsa mempunyai SDM yang berkualitas dan mampu mengolah semua potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka dipastikan perekonomian bangsa tersebut akan berada pada derajat yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim”.

(H.R. Ibnu Majah)

Hadist di atas menyebutkan bahwa keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ekonomi Islam menjadi salah satu syarat utama dalam menata perekonomian suatu bangsa dan negara yaitu dengan cara beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam yang tersedia sehingga mampumengangkat derajat orang-orang di suatu bangsa maupn negara pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini juga berkaitan dengan mashlahah adh-dharuriyyat yaitu *hifdzu al-‘aql* (menjaga akal). Dengan adanya pendidikan yang berkualitas dan terus meningkat, hal ini akan semakin menjaga kemaslahatan umat manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia, dkk (2019) bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina, dkk (2018) yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

4.6.3 Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas memperlihatkan nilai probabilitas F statistik sebesar $0,0000 < 0,05$. Dari hasil nilai probabilitas pada pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Otonomi Khusus Provinsi Aceh merupakan suatu wewenang yang ditujukan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh untuk mengatur dan mengurus wilayahnya dengan roda pemerintahannya tanpa terlepas dari pengawasan Pemerintah Pusat. Pemberian Otonomi Khusus kepada Provinsi Aceh karena kekhasan karakter masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam, selain itu juga wujud penghargaan negara terhadap dedikasi dan perjuangan yang sangat luar biasa dari Aceh selama perang kemerdekaan. Perlakuan khusus ini menjadi keuntungan bagi Provinsi Aceh untuk mengembangkan pemerintahannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Indikator lain yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan.

Dana otonomi khusus dan peningkatan taraf pendidikan di Provinsi Aceh mempunyai tujuan untuk mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Maka jika ditinjau dalam perspektif Islam hal tersebut sudah sejalan dengan prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Prinsip dan tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan *masalahah* untuk meraih *Falah*. *Falah* dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan. Hal tersebut menandakan bahwa dalam ekonomi Islam kepuasan duniawi tidak menjadi tujuan utama. Akan tetapi dengan terwujudnya *masalahah* yang berujung pada tercapainya *Falah* sehingga terpenuhi segala segi duniawi dan akhirat yang berupa materiil dan spiritual. Sehingga dapat diartikan bahwa dana otonomi khusus dan pendidikan di Provinsi Aceh sudah sah jika ditinjau dari konsep maupun kaidah-kaidah ekonomi Islam selama tidak melanggar Al-Qur'an dan Hadist.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dalam perspektif ekonomi syariah tahun 2017-2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa dana otonomi khusus yang diterima daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh belum mampu berkontribusi secara nyata dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal tersebut menandakan bahwa apabila tingkat pendidikan meningkat maka terjadi penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Pendidikan Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal tersebut menandakan bahwa dana otonomi khusus

dan tingkat pendidikan secara bersama-sama mampu berkontribusi secara nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan dapat memberikan perhatian lebih pada Kabupaten/Kota yang tergolong sebagai daerah dengan jumlah kemiskinan tinggi. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki peran yang penting dalam membuat program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi dana otonomi khusus di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh agar tidak terjadi kesenjangan dan alokasi dana otonomi khusus menjadi lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya daerah terpencil dengan berbagai program peningkatan pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat

mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan agar terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi maupun acuan bagi pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam meningkatkan dan mengoptimalkan dana otonomi khusus dan pendidikan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan model penelitian seperti menambah teori pendukung dalam perspektif ekonomi syariah dan menambah atau menggunakan variabel independen selain dana otonomi khusus dan tingkat pendidikan seperti Dana Bagi Hasil (DBH), tingkat kesehatan dan zakat dalam melihat pengaruh terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya', U (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 23-35.
- Agustina, dkk. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265-283.
- Alfiady, T & Dewi, R. (2020). Otonomi Khusus dan Kemiskinan di Aceh: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Jurnalisme*, 9(1), 1-20.
- Ali, S. Z. (2019). The Management Model of Aceh's Special Autonomy Fund. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(2), 159-170.
- Alqarni, dkk (2022). Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 66-79.
- Arispen, A., Rahmi, D. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB)*. 2(1). 20-41

- Aulia, dkk (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran dan Akuntansi*, 7(2), 101-111.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). *Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2021). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021*.
- Badrudin, R (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Fargana, T.M. & Ikhsan (2017). Pengaruh Perjanjian Damai Mou-Helsinki Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(4), 30-48.
- Gujarati, D. N., (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Terjemahan Mangunsong, R. C., Salemba Empat: Jakarta.
- Ikhsan (2015). Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 2(1), 91-114
- Itang (2017). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(1), 1-30.
- Kadafi, M & Murtala (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23-31.

- Mantsani, dkk. (2020). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*. 2(3), 1-19.
- Maulana (2019). Analisis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).
- Muliadi & Amri (2019). Penerimaan Zakat Dan Penurunan Kemiskinan Di Aceh: Peran Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 231-244.
- Parwa, A & Yasa, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(5), 40-62.
- Prasada, I.Y., Yulhar, T.F.M., & Rosa, T.A. (2020). Determinants of Poverty Rate in Java Island: Poverty Alleviation Policy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 95-104.
- Pokharel, T. (2015). Poverty in Nepal: Characteristics and Challenges. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 11(1), 44-56.
- Rahayu, S & Febriaty, H. (2021). Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Aceh. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 360-367.
- Rahma, M. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Jalan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2019 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).

- Rohani, M (2014). Kemiskinan dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Dan Makalah*, 8(1), 32.
- Sakinah (2022). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).
- Setiawan, D & Ulfa, K (2020). Poor Aceh: The Impact of Special Autonomy As Effort Poverty Reduction In Aceh. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 1-14.
- Sugiyono (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, R & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 90-115.
- Thahir, M.I., Semmaila, B., & Arfah, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Takalar. *Journal of Management Science*, 2(1), 61-81.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
- Warouw, dkk. (2016). Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), 45-67.

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*.
Yogyakarta: Ekonisia.





LAMPIRAN

**Lampiran 1 – Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di
Provinsi Aceh Per Maret 2022 (Ribuan Jiwa)**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Simeulue	18.40	18.22	17.67	17.34	18.25	17.86
Aceh Singkil	26.27	25.74	25.66	25.43	25.48	24.33
Aceh Selatan	32.51	32.82	31.06	30.91	32.25	30.78
Aceh Tenggara	30.84	30.20	28.93	28.98	29.31	28.42
Aceh Timur	63.67	61.64	62.79	62.34	63.69	62.16
Aceh Tengah	34.24	32.31	32.78	32.48	32.72	31.50
Aceh Barat	40.72	39.56	39.29	39.06	39.83	38.46
Aceh Besar	62.72	60.08	58.90	59.70	60.26	58.18
Pidie	92.35	89.53	86.29	86.39	88.53	85.87
Bireuen	71.54	65.74	63.60	62.42	63.02	60.29
Aceh Utara	118.74	111.27	107.34	106.41	109.49	107.02
Aceh Barat Daya	26.57	25.23	24.36	24.21	25.06	24.00
Gayo Lues	19.91	19.09	18.63	18.42	18.61	18.09
Aceh Tamiang	42.01	41.21	39.35	38.93	40.03	38.25
Nagan Raya	31.06	31.06	29.93	29.99	30.71	29.63
Aceh Jaya	13.23	12.85	12.35	12.11	12.63	12.13
Bener Meriah	29.99	29.08	28.45	28.38	28.69	27.93
Pidie Jaya	33.60	31.72	30.97	31.39	31.79	30.41
Banda Aceh	19.23	19.13	19.42	18.97	20.95	19.90
Sabang	5.98	5.62	5.43	5.27	5.33	5.14
Langsa	19.20	18.73	18.62	18.65	19.78	19.41
Lhokseumawe	24.40	23.88	23.05	22.69	23.38	23.03
Subulussalam	15.44	14.78	14.56	14.46	14.46	14.06
PROVINSI ACEH	872.61	839.49	819.44	814.91	834.24	806.82

**Lampiran 2 – Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota
Provinsi Aceh (Tahun)**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Simeulue	9.06	9.07	9.08	9.34	9.48	9.73
Aceh Singkil	7.84	8.05	8.52	8.53	8.68	8.69
Aceh Selatan	8.33	8.38	8.59	8.87	8.88	8.89
Aceh Tenggara	9.63	9.64	9.65	9.66	9.67	9.92
Aceh Timur	7.80	7.85	7.86	8.15	8.21	8.32
Aceh Tengah	9.67	9.68	9.69	9.85	9.86	9.87
Aceh Barat	9.04	9.08	9.09	9.37	9.55	9.87
Aceh Besar	9.93	10.14	10.31	10.32	10.33	10.35
Pidie	8.76	8.81	8.82	8.99	9.00	9.02
Bireuen	9.16	9.17	9.27	9.28	9.29	9.31
Aceh Utara	8.10	8.11	8.46	8.63	8.64	8.73
Aceh Barat Daya	8.12	8.13	8.35	8.66	8.67	8.68
Gayo Lues	7.39	7.69	7.91	8.20	8.40	8.41
Aceh Tamiang	8.47	8.70	8.89	8.90	8.91	9.04
Nagan Raya	8.25	8.26	8.50	8.68	8.69	8.95
Aceh Jaya	8.13	8.37	8.66	8.70	8.71	8.72
Bener Meriah	9.55	9.56	9.78	9.79	10.00	10.01
Pidie Jaya	8.84	8.86	9.04	9.33	9.34	9.53
Banda Aceh	12.59	12.60	12.64	12.65	12.83	13.03
Sabang	10.70	10.97	11.13	11.14	11.18	11.19
Langsa	10.90	11.06	11.10	11.11	11.12	11.14
Lhokseumawe	10.88	10.89	10.90	10.91	11.11	11.12
Subulussalam	7.12	7.39	7.58	7.84	8.03	8.22
PROVINSI ACEH	8.98	9.09	9.18	9.33	9.37	9.44

Lampiran 3 – Tabulasi Data Panel Penelitian Tahun 2017-2021

Wilayah	Tahun	MSK	DOK	RLS
Simeulue	2017	20.20	1422681	9.06
	2018	19.78	1175711	9.07
	2019	18.99	1055160	9.08
	2020	18.49	1109886	9.34
	2021	18.98	855506	9.48
Aceh Singkil	2017	22.11	988692	7.84
	2018	21.25	905667	8.05
	2019	20.78	889168	8.52
	2020	20.20	830525	8.53
	2021	20.36	637281	8.68
Aceh Selatan	2017	14.07	762940	8.33
	2018	14.01	578231	8.38
	2019	13.09	513347	8.59
	2020	12.87	575673	8.87
	2021	13.18	443467	8.88
Aceh Tenggara	2017	14.86	839863	9.63
	2018	14.29	832788	9.64
	2019	13.43	597795	9.65
	2020	13.21	595429	9.66
	2021	13.41	457040	9.67
Aceh Timur	2017	15.25	601801	7.80
	2018	14.49	446394	7.85
	2019	14.47	461925	7.86
	2020	14.08	385677	8.15
	2021	14.45	29530	8.21
Aceh Tengah	2017	16.84	816708	9.67
	2018	15.58	601850	9.68
	2019	15.50	567552	9.69
	2020	15.08	607001	9.85

	2021	15.26	466606	9.86
Aceh Barat	2017	20.28	719811	9.04
	2018	19.31	587145	9.08
	2019	18.79	505375	9.09
	2020	18.34	591151	9.37
	2021	18.81	455359	9.55
Aceh Besar	2017	15.41	404995	9.93
	2018	14.47	306428	10.14
	2019	13.92	282956	10.31
	2020	13.84	341344	10.32
	2021	14.05	262662	10.33
Pidie	2017	21.43	402646	8.76
	2018	20.47	318694	8.81
	2019	19.46	343658	8.82
	2020	19.23	336683	8.99
	2021	19.59	259196	9.00
Bireuen	2017	15.87	319371	9.16
	2018	14.31	258322	9.17
	2019	13.56	221796	9.27
	2020	13.06	311319	9.28
	2021	13.25	240495	9.29
Aceh Utara	2017	19.78	296558	8.10
	2018	18.27	213470	8.11
	2019	17.39	199542	8.46
	2020	17.02	263555	8.63
	2021	17.43	202994	8.64
Aceh Barat Daya	2017	18.31	867370	8.12
	2018	17.10	729247	8.13
	2019	16.26	693132	8.35
	2020	15.93	717998	8.66
	2021	16.34	552258	8.67

Gayo Lues	2017	21.97	2330589	7.39
	2018	20.70	1750036	7.69
	2019	19.87	1720828	7.91
	2020	19.32	1300085	8.20
	2021	19.64	997847	8.40
Aceh Tamiang	2017	14.69	520486	8.47
	2018	14.21	410887	8.70
	2019	13.38	368233	8.89
	2020	13.08	420981	8.90
	2021	13.34	324616	8.91
Nagan Raya	2017	19.34	1137234	8.25
	2018	18.97	996624	8.26
	2019	17.97	770829	8.50
	2020	17.70	720172	8.68
	2021	18.23	553184	8.69
Aceh Jaya	2017	14.85	1828115	8.13
	2018	14.16	1426195	8.37
	2019	13.36	1309162	8.66
	2020	12.87	1240982	8.70
	2021	13.23	951996	8.71
Bener Meriah	2017	21.14	893629	9.55
	2018	20.13	749379	9.56
	2019	19.30	691989	9.78
	2020	18.89	662855	9.79
	2021	19.16	506048	10.00
Pidie Jaya	2017	21.82	634799	8.84
	2018	20.17	596134	8.86
	2019	19.31	541634	9.04
	2020	19.19	632340	9.33
	2021	19.55	484905	9.34
Banda Aceh	2017	7.44	495699	12.59
	2018	7.25	304623	12.60

	2019	7.22	250581	12.64
	2020	6.90	549493	12.65
	2021	7.61	424283	12.83
Sabang	2017	17.66	2199567	10.70
	2018	16.31	2259663	10.97
	2019	15.60	2119864	11.13
	2020	14.94	1986727	11.14
	2021	15.32	1511518	11.18
Langsa	2017	11.24	537193	10.90
	2018	10.79	500701	11.06
	2019	10.57	441380	11.10
	2020	10.44	514888	11.11
	2021	10.96	395018	11.12
Lhokseumawe	2017	12.32	441961	10.88
	2018	11.81	426030	10.89
	2019	11.18	383216	10.90
	2020	10.80	509440	10.91
	2021	11.16	392547	11.11
Subulussalam	2017	19.71	1478610	7.12
	2018	18.51	1333175	7.39
	2019	17.95	1196205	7.58
	2020	17.60	1074884	7.84
	2021	17.65	817391	8.03

Lampiran 4 – Hasil Output Eviews

Statistik Deskriptif

	MSK	DOK	RLS
Mean	16.07235	119.530.790.135	9.287130
Median	15.93000	115.608.684.514	9.040000
Maximum	22.11000	252.512.203.750	12.83000
Minimum	6.900000	63.583.498.211	7.120000
Std. Dev.	3.574845	0.267603	1.217174
Skewness	-0.477039	0.244091	0.961549
Kurtosis	2.671568	2.817787	3.665447
Jarque-Bera	4.878544	1.301051	19.84289
Probability	0.087224	0.521772	0.000049
Sum	1848.320	2929.121	1068.020
Sum Sq.Dev.	1456.865	8.163694	168.8926
Observations	115	115	115

Koefisien Korelasi

Variabel	Koefisien Korelasi		
	MSK	DOK	PDK
MSK	1,000000	0,314677	-0,652291
DOK	0,314677	1,000000	-0,163493
PDK	-0,65291	-0,163493	1,000000

Estimasi Regresi *Common Effect Model*

Dependent Variable: MSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/16/23 Time: 17:54

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DOK)	1.354968	0.429075	3.157884	0.0020
RLS	-1.781119	0.206031	8.644907	0.0000
C	14.56715	6.395809	2.277608	0.0246
Root MSE	2.585178	R-squared		0.472455
Mean dependent var	16.07235	Adjusted R-squared		0.463035
S.D. dependent var	3.574845	S.E. of regression		2.619573
Akaike info criterion	4.789640	Sum squared resid		768.5620
Schwarz criterion	4.861247	Log likelihood		-272.4043
Hannan-Quinn criter.	4.818705	F-statistic		50.15208
Durbin-Watson stat	0.057975	Prob(F-statistic)		0.000000

Estimasi Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: MSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/16/23 Time: 17:55

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DOK)	0.622619	0.353141	1.763091	0.0813
RLS	-2.380668	0.331278	-7.186318	0.0000
C	29.88932	7.137269	4.187781	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.461492	R-squared	0.983188
Mean dependent var	16.07235	Adjusted R-squared	0.978705
S.D. dependent var	3.574845	S.E. of regression	0.521665
Akaike info criterion	1.726079	Sum squared resid	24.49212
Schwarz criterion	2.322803	Log likelihood	-74.24954
Hannan-Quinn criter.	1.968286	F-statistic	219.3113
Durbin-Watson stat	1.592598	Prob(F-statistic)	0.000000

Estimasi Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: MSK

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/16/23 Time: 18:01

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DOK)	0.795838	0.316942	2.510986	0.0135
RLS	-2.177321	0.272411	-7.992782	0.0000
C	25.69373	6.105424	4.208345	0.0001

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	2.715363	0.9644
Idiosyncratic random	0.521665	0.0356

Weighted Statistics

Root MSE	0.513117	R-squared	0.567530
Mean dependent var	1.375819	Adjusted R-squared	0.559807
S.D. dependent var	0.783674	S.E. of regression	0.519944
Sum squared resid	30.27830	F-statistic	73.48877
Durbin-Watson stat	1.310156	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.451005	Mean dependent var	16.07235
Sum squared resid	799.8114	Durbin-Watson stat	0.049598



Pemilihan Model Regresi *Uji Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	124.281695	(22,90)	0.0000
Cross-section Chi-square	396.309525	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: MSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/16/23 Time: 18:08

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DOK)	1.354968	0.429075	3.157884	0.0020
RLS	-1.781119	0.206031	-8.644907	0.0000
C	14.56715	6.395809	2.277608	0.0246

Root MSE	2.585178	R-squared	0.472455
Mean dependent var	16.07235	Adjusted R-squared	0.463035
S.D. dependent var	3.574845	S.E. of regression	2.619573

Akaike info criterion	4.789640	Sum squared resid	768.5620
Schwarz criterion	4.861247	Log likelihood	-272.4043
Hannan-Quinn criter.	4.818705	F-statistic	50.15208
Durbin-Watson stat	0.057975	Prob(F-statistic)	0.000000



Pemilihan Regresi Model Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.262189	2	0.5320

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(DOK)	0.622619	0.795838	0.024256	0.2660
RLS	-2.380668	-2.177321	0.035537	0.2807

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: MSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/16/23 Time: 18:10

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.88932	7.137269	4.187781	0.0001
LOG(DOK)	0.622619	0.353141	1.763091	0.0813
RLS	-2.380668	0.331278	-7.186318	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.461492	R-squared	0.983188
Mean dependent var	16.07235	Adjusted R-squared	0.978705
S.D. dependent var	3.574845	S.E. of regression	0.521665
Akaike info criterion	1.726079	Sum squared resid	24.49212
Schwarz criterion	2.322803	Log likelihood	-74.24954
Hannan-Quinn criter.	1.968286	F-statistic	219.3113
Durbin-Watson stat	1.592598	Prob(F-statistic)	0.000000



Pemilihan Regresi Model Uji Lagrange Multiplier

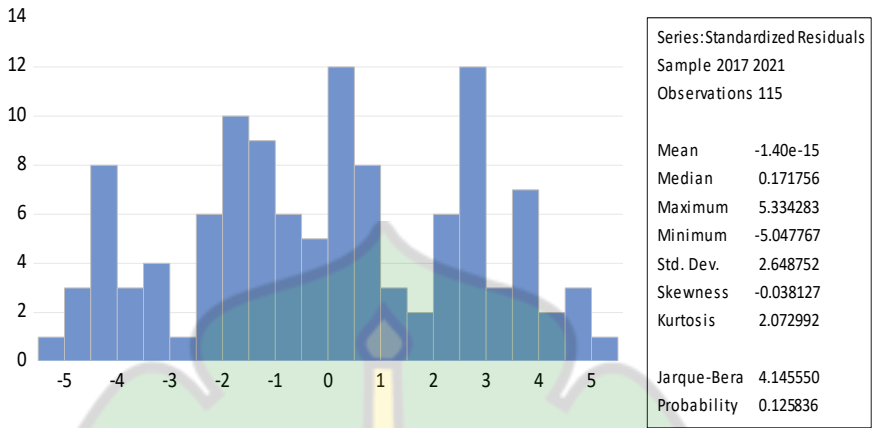
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	211.1381 (0.0000)	0.850959 (0.3563)	211.9890 (0.0000)
Honda	14.53059 (0.0000)	-0.922474 (0.8219)	9.622391 (0.0000)
King-Wu	14.53059 (0.0000)	-0.922474 (0.8219)	4.850814 (0.0000)
Standardized Honda	15.52614 (0.0000)	-0.677720 (0.7510)	7.066290 (0.0000)
Standardized King-Wu	15.52614 (0.0000)	-0.677720 (0.7510)	2.638913 (0.0042)
Gourieroux, et al.	--	--	211.1381 (0.0000)

Pengujian Asumsi Uji Normalitas



Pengujian Asumsi Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Koefisien Korelasi	
	LOG (DOK)	PDK
LOG (DOK)	1	-0,206974
PDK	-0,206974	1

Pengujian Asumsi Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/16/23 Time: 18:44

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.929623	3.450320	0.269431	0.7881
LOG(DOK)	0.273510	0.231471	1.181614	0.2399
RLS	-0.254750	0.111147	-2.292021	0.0238
Root MSE	1.394615	R-squared	0.067587	
Mean dependent var	2.206569	Adjusted R-squared	0.050937	
S.D. dependent var	1.450597	S.E. of regression	1.413170	
Akaike info criterion	3.555288	Sum squared resid	223.6695	
Schwarz criterion	3.626895	Log likelihood	-201.4291	
Hannan-Quinn criter.	3.584353	F-statistic	4.059222	
Durbin-Watson stat	0.173443	Prob(F-statistic)	0.019864	

Lampiran 5 – Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Citra Pujianita Adinda
NIM : 190602127
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 21 Maret 1999
Status : Belum Menikah
Alamat : Emperom, Jaya Baru, Banda Aceh
No.Hp : 082363196322
Email : 190602127@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Banda Aceh : 2010
2. SMPN 19 Percontohan Banda Aceh : 2013
3. SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh : 2016
4. Diploma III Manajemen Perhotelan Syariah
International Hotel Management School Solo : 2019
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Daud
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nazira
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Emperom, Jaya Baru, Banda Aceh